



**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN**  
**KETERPADUAN BKB, PAUD, DAN SDIDTK**  
**STUDI KASUS DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**Disusun Oleh :**

**Asar Janjang Lestari**

**NIM : 500641332**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS TERBUKA**

**2017**

## ABSTRAK

Suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan atau implementasi. Fenomena masih lemahnya implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana yang diperoleh dari hasil survei pendahuluan, merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dijadikan kajian penelitian lebih mendalam. Berdasarkan survei pendahuluan, yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperoleh gambaran umum bahwa belum pernah dilakukan pengkajian dan analisis pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan diteliti adalah implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul belum optimal dilaksanakan. Pada aspek organisasi, interpretasi dan pelaksanaan, implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul sudah terlaksana dengan cukup baik, tetapi berbagai masalah masih ditemui, baik yang menyangkut lemahnya regulasi peraturan daerah, rendahnya dukungan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor terkait, maupun permasalahan yang dialami dengan kurang optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kuantitas SDM yang kurang memadai.

Kata kunci: implementasi kebijakan, layanan keterpaduan, BKB, PAUD, SDIDTK

## ABSTRACT

A policy is meaningless without implementation. The phenomenon of weak implementation of BKB, PAUD, and SDIDTK service policies in Gunungkidul Regency as obtained from the preliminary survey results, is an interesting phenomenon to be a more in-depth study. Based on the preliminary survey, conducted in the office of Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaam Masyarakat dan Desa, it is generally accepted that there has never been an assessment and analysis of the implementation of BKB, PAUD and SDIDTK integrated service policies in Gunungkidul Regency.

This study aims to analyze the implementation of integrated services BKB, early childhood, and SDIDTK in Gunungkidul. The research design uses qualitative research using a case study research approach in the sense of research focused on a single phenomenon chosen and wanted to be understood in depth, regardless of other phenomena. In this research, the phenomenon to be studied is the implementation of BKB, PAUD and SDIDTK integrated service policies in Gunungkidul Regency.

The result of analysis shows that the implementation of BKB, PAUD, and SDIDTK service policies in Gunungkidul Regency has not been optimally implemented. In the aspect of organization, interpretation and implementation, the implementation of BKB, PAUD and SDIDTK service policies in Gunungkidul Regency has been done well, but various problems are still encountered, including weak local regulations, low budget support, weak coordination across sectors, as well as problems experienced by less optimal quality of human resources and insufficient quantity of human resources.

Keywords: policy implementation, service integration BKB, PAUD, SDIDTK

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Semarang, Agustus 2017  
Yang menyatakan



UNIVERSITAS TERBUKA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
40AEF818549392  
REPUBLIC OF INDONESIA  
RUPIAH

Asar Janjang Lestari

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Nama : Asar Janjang Lestari  
NIM : 500641332  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB,PAUD,  
dan SDIDTK(Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)  
Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Minggu, 16 Juli 2017  
Waktu : 14.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama: Drs. Jamaludin, M.Si

Tandatangan

Penguji Ahli

Nama: Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. rer. publ

Pembimbing I

Nama: Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Si, Akt

Pembimbing II

Nama: Prof. Dra. Suciati, M.Sc, PH.D

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK(Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul)

Penyusun TAPM : Asar Janjang Lestari  
 NIM : 500641332  
 Program Studi : Magister Adminitrasi Publik  
 Hari/Tanggal : Minggu / 16 Juli 2017

Menyetujui

Pembimbing II

Prof. Dra. Suciati, M.Sc., Ph.D  
 NIP.19520213 198503 2 001

Pembimbing I

Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Si, Akt  
 NIP.19660108 1992021 001

Mengetahui,

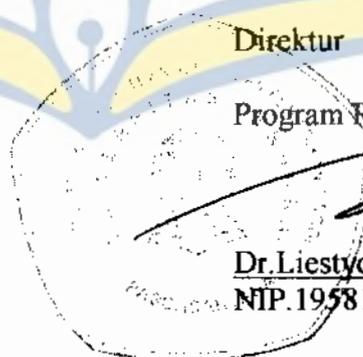
Ketua Bidang Ilmu Sosial &amp; Ilmu Politik

Program Magister Administrasi Publik

Dr. Darmanto, M.Ed  
 NIP.19591027 198603 1003

Direktur

Program Pascasarjana



Dr. Liestyodono Bawono, M.Si  
 NIP.19581215 198601 1009

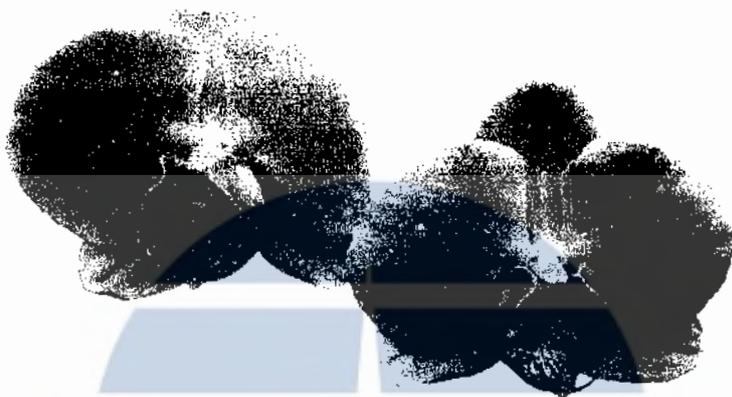
**MOTTO**

*Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi diri sendiri,  
Jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi diri sendiri  
(Q.S. Al Isra : 7)*



*Tempuh malam hingga petang  
Tempuh badai hingga reda  
Tempuh perang hingga menang  
Tempuh duka hingga suka  
(R.A Kartini)*

## PERSEMBAHAN



Kupersembahkan  
kepada ibu dan bapak tercinta,  
suamiku yang selalu mendoakan  
dan memberi dukungan, anak-anaku yang mandiri dan rela  
kehilangan sebagian waktu bersama bunda,  
twin yang energy psikisnya selalu nyambung, dan sahabat hati yang selalu  
menemani  
setiap detik proses penyelesaian tesis ini hingga akhir  
bersama malaikat penjaga

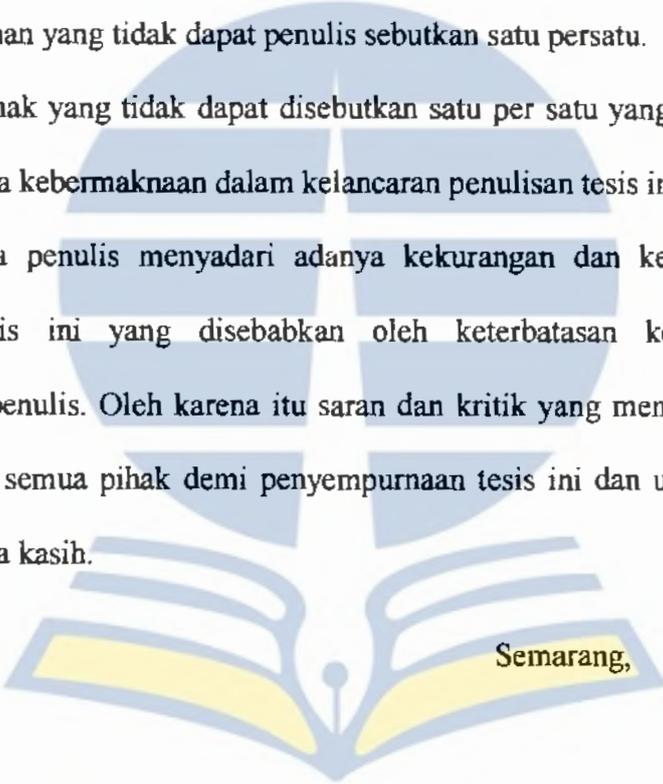
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana S-2 Program Magister Administrasi Publik UPBJJ Universitas Terbuka Semarang. Selama penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Si, Akt selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, arahan serta motivasi dalam proses penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dra. Suciati, M.Sc, Ph. D selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, arahan serta motivasi dalam proses penulisan tesis ini.
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang telah memberikan izin dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan S-2 Program Studi Magister Administrasi Publik..
4. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Magister Administrasi Publik UPBJJ UT Semarang yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk bekal dalam melaksanakan tugas.
5. Pengelola Program Magister Administrasi Publik UPBJJ UT Semarang beserta jajarannya.

6. Kepala DP3AKBPMD Kabupaten Gunungkidul atas segala bantuan data dan referensi yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.
7. Semua teman DP3AKBPMD dan BKPPD Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan *support* kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi ini.
8. Semua rekan mahasiswa seperjuangan program Beasiswa BKKBN dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang memiliki andil dan berjuta kebermaknaan dalam kelancaran penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun penulis harapkan dari semua pihak demi penyempurnaan tesis ini dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.



Semarang, Juni 2017

Penulis

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Asar Janjang Lestari  
NIM : 500641332  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 10 November 1976  
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN Mulo II Wonosari pada tahun 1989  
Lulus SLTP di SMPN Mulo Wonosari pada tahun 1992  
Lulus SLTA di SMAN 3 Yogyakarta pada tahun 1995  
Lulus S1 di Fakultas Psikologi UGM pada tahun 2004  
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2002 s/d 2005 : guru di SDIT Tunas Mulia  
Wonosari  
Tahun 2004 s/d 2007 : dosen tidak tetap di STITY  
Wonosari  
Tahun 2006 s/d sekarang : PNS di PEMDA  
Gunungkidul  
Alamat Tetap : Teguhan RT 01 RW 03 Wunung, Wonosari,  
Gunungkidul  
Telp/HP : 081802698080

Semarang, Juni 2017



Asar Janjang Lestari

NIM : 500641332

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i       |
| HALAMAN PERNYATAAN .....  | ii      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....   | iii     |
| PRAKATA .....   | iv      |
| DAFTAR ISI .....  | v       |
| DAFTAR GAMBAR.....  | viii    |
| DAFTAR TABEL .....  | ix      |
| ABSTRAK .....   | x       |
| ABSTRACT .....  | xi      |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1       |
| A. Latar Belakang .....   | 1       |
| B. Rumusan Permasalahan Penelitian .....                              | 6       |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7       |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 8       |
| E. Sistematika Penulisan .....  | 8       |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....   | 10      |
| A. Landasan Teori .....   | 10      |
| 1 Kebijakan Publik .....  | 10      |
| 2 Implementasi Kebijakan Publik .....                                 | 12      |
| 3 Program Bina Keluarga Balita .....                                  | 15      |
| 4 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .....                      | 19      |
| 5 Program Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh<br>Kembang ..... | 30      |
| B. Hasil Penelitian Sebelumnya .....                                  | 34      |
| C. Alur Pemikiran .....   | 36      |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                       | 39      |
| A. Objek Penelitian .....   | 39      |
| B. Desain Penelitian .....  | 39      |
| C. Sumber Data dan Informan .....                                     | 40      |

|  |      |
|--|------|
| D. Lokasi Penelitian .....   | 42   |
| E. Instrumen Penelitian .....  | 43   |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....   | 43   |
| G. Teknik Analisis Data .....  | 45   |
| H. Pengujian Keabsahan Data .....  | 45   |
| <br>   |      |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....  | 47   |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul .....   | 47   |
| B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana,<br>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) .....     | 50   |
| C. Gambaran Umum Informan Penelitian .....   | 58   |
| D. Peta dan Kondisi Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan<br>BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul .....                                 | 59   |
| E. Implementasi Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan<br>BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul .....                                     | 62   |
| F. Masalah Yang Ada Terkait Implementasi Kebijakan<br>Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK<br>di Kabupaten Gunungkidul .....                      | 81   |
| G. Tindakan Yang Diambil Untuk Mengatasi Masalah<br>Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan<br>BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul ..... | 86   |
| <br>   |      |
| BAB V PENUTUP .....  | 89   |
| A. Kesimpulan .....  | 89   |
| B. Implikasi Teoritis .....  | 94   |
| C. Implikasi Kebijakan .....   | 96   |
| D. Implikasi Keterbatasan .....  | 96   |
| E. Saran .....   | 97   |
| <br>   |      |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | xii  |
| LAMPIRAN .....   | xiii |

## DAFTAR GAMBAR

|   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1 Alur Pemikiran .....                     | 34      |
| Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi DP3AKBPM ..... | 48      |



## DAFTAR TABEL

|           |  | Halaman |
|-----------|--|---------|
| Tabel 2.1 | Hasil Penelitian Sebelumnya .....  | 32      |
| Tabel 4.1 | Kondisi Kecamatan Dan Desa di Kabupaten<br>Gunungkidul.....                | 46      |
| Tabel 4.2 | Komposisi Informan Berdasarkan Umur .....                                  | 55      |
| Tabel 4.3 | Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....                          | 55      |
| Tabel 4.4 | Komposisi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....                    | 56      |
| Tabel 4.5 | Lokasi Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di<br>Kabupaten Gunungkidul ..... | 57      |
| Tabel 4.6 | Permasalahan yang ditemui kelompok .....                                   | 64      |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 pada alinea empat mengamanatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dijelaskan pada pasal 28 B ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1).

Direktorat PAUD (2008) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan upaya yang sengaja direncanakan oleh pihak yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat guna mengembangkan potensi manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia dikategorikan dalam empat tahap, yaitu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dari keempat tahap ini, pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan yang penting dan sebagai pondasi bagi pendidikan selanjutnya.

Sejalan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah “suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut” (pasal 1, butir 14).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, mempunyai kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering disebut sebagai masa emas perkembangan (*golden age* atau *golden momen*). Pada usia ini anak-anak masih sangat rentan, dan apabila penanganannya tidak tepat justru dapat merugikan anak tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan PAUD harus memperhatikan dan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak (Direktorat PAUD : 2008).

Morrison (1988) menyebutkan bahwa PAUD tidak dimaksudkan untuk mencuri start apa yang seharusnya diperoleh anak pada jenjang pendidikan dasar, melainkan untuk memberikan fasilitasi pendidikan yang sesuai bagi anak agar mereka memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, maupun sosial/emosional, dalam rangka memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD menjadi bagian yang penting untuk dikaji karena kualitas hidup sumber daya manusia Indonesia mendatang ditentukan oleh anak-anak saat ini, sehingga anak-anak patut mendapat perhatian yang khusus untuk menanamkan budi pekerti yang baik sejak dini.

Berdasarkan kajian di atas, pengembangan anak usia dini merupakan hal yang penting sehingga layanan bagi anak usia dini perlu dioptimalkan. Guna mengoptimalkan layanan bagi anak usia dini ini, pemerintah meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial dasar di Posyandu serta Peraturan

Gubernur DIY No 36 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengintegrasian Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini dan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang di Pos Pelayanan Terpadu. Kebijakan ini mengacu pada Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang RI nomor 52 th 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Di Kabupaten Gunungkidul kebijakan ini diimplementasikan melalui layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK. Pada pelaksana program BKB (Bina Keluarga Balita) dikembangkan pengelolaan kegiatan berbasis masyarakat. Pengelolaan kegiatan yang berbasis masyarakat seperti ini dapat terlaksana dengan baik bila masyarakat turut ambil bagian di dalamnya. Pembangunan selama ini sekedar diartikan sebagai transformasi ekonomi sehingga paradigma yang dikembangkan adalah bagaimana mengubah keadaan masyarakat dari miskin menjadi tidak miskin. Paradigma ini menyebabkan transformasi sosial dalam arti pemanfaatan kreativitas sebagai pemerataan akses ke sumber kekuasaan belum tercapai, padahal transformasi sosial adalah aspek yang cukup urgen dalam pembangunan masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika inisiatif masyarakat belum berkembang dan mereka masih tetap bergantung pada pemegang kekuasaan/pemerintah. Begitu pula dengan kegiatan BKB, masih banyak bergantung pada pemerintah. Dari sekitar 348 kelompok BKB yang tersebar di 18 kecamatan dan 144 desa di Kabupaten Gunungkidul, sebagian besar kegiatannya kurang optimal dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana dari pemerintah, dan lemahnya inisiatif dari masyarakat. (BPMPKB, 2015).

Pada aspek kesehatan, jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 1463 Posyandu (Profil Dinas Kesehatan, 2014) baru sebagian kecil yang melaksanakan layanan holistik integratif. Dari sejumlah 18 kecamatan, rata-rata baru terdapat 1 layanan PAUD holistik integratif dengan keterpaduan layanan PAUD, BKB, dan Posyandu.

PAUD holistik integratif merupakan pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak. Disebut PAUD holistik integratif karena pelayanan yang diberikan dalam *PAUD holistik integratif* tidak hanya dalam satu bidang pendidikan saja, akan tetapi pelayanan yang mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak. Pada pelaksanaannya dilakukan dalam keterpaduan program Bina Keluarga Balita, PAUD, dan Posyandu. Direktorat PAUD (2008) menjelaskan bahwa tujuan dari PAUD holistik integratif adalah untuk terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur; serta terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada; terselenggaranya pelayanan anak

usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dan masyarakat; serta terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Van Meter dan Van Horn (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2016 : 149) membatasi implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Gordon (dalam T Keban, 2008 : 76), menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Implementasi dengan kata lain merupakan tahap merealisasi tujuan-tujuan program atau kebijakan yang telah dibuat.

Fenomena masih lemahnya implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana yang diperoleh dari hasil survei pendahuluan, merupakan sebuah hal yang menarik untuk dijadikan kajian penelitian lebih mendalam. Berdasarkan survei pendahuluan, yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperoleh gambaran umum bahwa belum pernah dilakukan pengkajian dan analisis pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Laporan lengkap terkait pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul juga belum ditemukan. Berdasarkan survei pendahuluan, juga diperoleh gambaran awal bahwa sebenarnya setiap kecamatan terdapat layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan

SDIDTK tetapi kemajuan perkembangannya sebagai program kebijakan belum termonitor dan terevaluasi secara mendalam oleh pemegang kebijakan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, nampak cukup jelas berbagai persoalan yang mengindikasikan terjadinya kendala pada implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan implementasi kebijakan publik di Kabupaten Gunungkidul tentang Pelaksanaan Pengintegrasian BKB, PAUD, dan SDIDTK di Posyandu ini menarik untuk dijadikan kajian penelitian. Hal ini dilakukan agar implementasi kebijakan di Kabupaten Gunungkidul dalam hal layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK dapat dideskripsikan secara utuh dan menyeluruh.

Kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan ini juga perlu untuk diteliti lebih jauh sehingga dapat dilakukan pemetaan secara tepat terhadap kondisi implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Adanya pemetaan yang baik tentang kondisi implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK ini diharapkan dapat membantu pemilihan strategi implementasi kebijakan yang lebih tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan anak usia dini dan kualitas keluarga di Kabupaten Gunungkidul.

## **B. Rumusan Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan lima permasalahan utama yaitu :

1. Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
3. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
4. Tindakan apa saja yang diambil untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
5. Bagaimana efektivitas tindakan tersebut untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.
3. Untuk menganalisis masalah yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

4. Untuk menganalisis tindakan apa saja yang diambil untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.
5. Untuk menganalisis sejauhmana efektivitas tindakan tersebut untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah khususnya untuk pengembangan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul .
2. Manfaat teoritis untuk memberikan sumbangan pada konsep-konsep kebijakan dan pelayanan publik sehingga dapat memperkaya isi konsep kebijakan tersebut.
3. Manfaat bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian sejenis.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Kajian Pustaka terdiri atas landasan teori, penelitian sebelumnya dan alur pikir.

Bab III Metode Penelitian terdiri atas objek penelitian, desain penelitian, sumber data dan informan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data (validitas dan reliabilitas). Bab IV Hasil dan Pembahasan terdiri dari Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul, Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD), Gambaran Umum Informan Penelitian, Peta dan Kondisi Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul, Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul, Masalah Yang Ada Terkait Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul, Tindakan Yang Diambil Untuk Mengatasi Masalah Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK. Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan, Implikasi Teoritis, Implikasi Kebijakan, Implikasi Keterbatasan, Saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kebijakan Publik

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2016) bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Pengertian kebijakan publik juga dikemukakan oleh Anderson (2014) merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Menurut Anderson (2014), kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson mengatakan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.
2. Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
3. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
4. Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
5. Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

Dye (1975) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Konsep lain kebijakan publik didefinisikan para ahli dengan makna yang berbeda-beda. Amir Santoso (sebagaimana dikutip dalam Kusumanegara, 2010) menggolongkan pengertian kebijakan publik dalam dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah, yang menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak, yang menganggap bahwa kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu serta memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Selanjutnya Jones (1994) memandang kebijakan publik adalah suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Prinsip-prinsip pendekatan Jones tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kejadian-kejadian dalam masyarakat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda.
- b. Banyak masalah yang timbul karena adanya peristiwa yang sama.

- c. Ada berbagai tingkatan atau tahapan yang harus dilalui kelompok penekan untuk memasuki proses kebijakan yang ada.
- d. Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah.
- e. Banyak juga kepentingan elit yang diangkat menjadi isu kebijakan dalam pemerintahan.
- f. Banyak masalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik sengaja maupun tidak.
- g. Pembuatan kebijakan tidak berhadapan dengan kelompok yang ada di masyarakat.
- h. Banyak pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dan komunikasi yang kurang akurat.
- i. Kebijakan yang dibuat sering direfleksikan sebagai konsensus daripada substansi dari pemecahan masalah.
- j. Terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kebijakan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang terlibat.
- k. Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti yang dirancang.
- l. Organisasi yang ada dalam masyarakat memiliki kepentingan dan fokus yang berbeda.

## **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas menurut Lester dan Stewart (2000), merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang

dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Sejalan dengan hal tersebut, Ripley dan Franklin (1982) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Menurut Anderson (2014) implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses administrasi, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat, di mana proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn (sebagaimana dikutip dalam Agostino, 2008 :139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut : adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, adanya hasil kegiatan. Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu

kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Rahma (2016) menjelaskan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat atau kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Pada titik ini, implementasi atau langkah pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting tetapi tidak berarti bahwa telah terlepas dari proses formulasi sebelumnya, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan, di samping itu ketidakjelasan kebijakan adalah sebab utama kegagalan pelaksanaan.

Adapun Jones (1994) menjelaskan bahwa ada tiga pilar penilaian implementasi kebijakan yaitu :

- a. Organisasi, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.

- b. Interpretasi, di mana pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Penerapan, peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap sesuatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapaun implementasi kebijakan yang sesuai dengan penelitian ini adalah menggunakan teori Jones dengan melalui tiga pilar yaitu organisasi, interpretasi dan pelaksanaan.

### **3. Program Bina Keluarga Balita (BKB)**

Program BKB dicanangkan Bapak Soeharto pada hari ibu tahun 1981. Program ini merupakan suatu program yang melengkapi program-program pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan seperti misalnya program-program perbaikan kesehatan dan gizi ibu dan anak (BKKBN, 2011).

Pelaksanaan program BKB dimulai pada tahun anggaran 1985/1986. Hal ini berdasarkan pengarahan Ibu Negara pada tanggal 21 Juli 1984 melalui Surat

Keputusan Bersama Menteri Negara UPW dan Kepala BKKBN No 11 KEPMEN UPW/IX/84 dan No 170/HK010/E3/84 tentang kerjasama pelaksanaan pengembangan proyek BKB dalam keterpaduan dengan program KB dalam rangka mempercepat proses pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Keputusan Bersama ini menggariskan BKKBN sebagai penanggung operasional BKB (BKKBN, 2006).

a. Ciri Khusus Program BKB

Program BKB memiliki beberapa ciri utama diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menitikberatkan pada pembinaan ibu dan anggota keluarga lainnya yang memiliki balita
- 2) Membina tumbuh kembang anak
- 3) Menggunakan alat bantu seperti Alat Permainan Edukatif (APE), dongeng, nyanyian sebagai perangsang tumbuh kembang anak.
- 4) Menekankan pada pembangunan manusia pada usia dini, baik fisik maupun mental
- 5) Tidak langsung ditujukan kepada balita
- 6) Meningkatkan keterampilan ibu dan anggota keluarga lainnya agar dapat mendidik dan mendidik balitanya (BKKBN, 2006).

b. Tujuan BKB

BKB dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu dan anggota keluarga lainnya tentang pentingnya : proses tumbuh kembang balita dalam aspek fisik, mental dan sosial

2) Meningkatkan keterampilan ibu dan anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan tumbuh kembang anak secara optimal, antara lain dengan stimulus mental dengan menggunakan Alat Permainan Edukatif (APE) dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia (BKKBN, 2011).

c. Kegiatan BKB

BKB dilaksanakan untuk membina kelompok sasaran keluarga yang mempunyai anak Balita. Kelompok sasaran ini, dibagi menjadi enam kelompok menurut umur anaknya, yaitu :

1. Kelompok sasaran dengan anak usia 0-1 tahun
2. Kelompok sasaran dengan anak usia 1-2 tahun
3. Kelompok sasaran dengan anak usia 2-3 tahun
4. Kelompok sasaran dengan anak usia 3-4 tahun
5. Kelompok sasaran dengan anak usia 4-5 tahun
6. Kelompok ibu sasaran dengan anak usia 5-6 tahun

Pembagian kelompok usia ini sesuai dengan tugas perkembangan anak, dimana tiap-tiap kelompok umur tersebut mempunyai tugas perkembangan anak (BKKBN, 2011).

BKB sebaiknya berada pada tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat dan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian kegiatan BKB dapat dilaksanakan di pos pelayanan yang telah ada, rumah penduduk, balai desa, tempat pertemuan RT atau di tempat khusus yang dibangun oleh masyarakat.

Adapun kegiatan BKB dilakukan oleh kader yang terlatih dengan tiga kegiatan :

1. Penyuluhan
2. Bermain APE (Alat Permainan Edukatif)
3. Pencatatan hasil perkembangan ke dalam KKA

Kegiatan BKB adalah kegiatan pelayanan pada hari buka BKB yang dilakukan minimal satu hari dalam sebulan. Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka jumlah kader setiap BKB minimal 12 orang yang dibagi dalam enam kelompok umur. Setiap kelompok umur dibina kader inti yang memberikan penyuluhan, kader piket yang mengasuh anak balita dan kader bantu yang membantu dan dapat menggantikan tugas kader inti atau kader piket demi kelancaran tugas (BKKBN, 2006).

Isi materi pada kegiatan penyuluhan BKB berbeda pada setiap kelompok umur balita. Hal ini sesuai dengan tugas perkembangan anak yang berbeda masing-masing kelompok umur, sehingga cara stimulasi maupun media yang diperlukan untuk interaksi antara ibu dan anak pun berbeda. Pada program BKB, secara garis besarnya materi penyuluhan diantaranya :

1. Bersiap-siap menjadi orangtua
2. Memahami peran orangtua
3. Memahami konsep diri orangtua
4. Melibatkan peran ayah

5. Mendorong tumbuh kembang anak
6. Membantu tumbuh kembang balita
7. Menjaga anak dari pengaruh media
8. Menjaga kesehatan reproduksi balita
9. Membentuk karakter anak sejak dini

(BKKBN, 2015)

#### **4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan dilaksanakannya pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak usia dini, yakni sejak anak dilahirkan. Disebutkan secara tegas dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (pasal 1, butir 14).

Selanjutnya dinyatakan secara tegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 (pasal 28) antara lain bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dan PAUD dapat diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal (seperti Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat), jalur pendidikan non formal (seperti Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau

bentuk lain yang sederajat), serta jalur pendidikan informal (seperti PAUD dalam keluarga atau yang diselenggarakan oleh lingkungan).

Proses pendidikan dan pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep yang bermakna bagi anak melalui pengalaman nyata. Hanya pengalaman nyatalah yang memungkinkan anak menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu (*curiosity*) secara optimal dan menempatkan posisi pendidik sebagai pendamping, pembimbing serta fasilitator bagi anak. Melalui proses pendidikan diharapkan dapat menghindari bentuk pembelajaran yang hanya berorientasi pada kehendak guru yang menempatkan anak secara pasif dan guru menjadi dominan.

Direktorat PAUD (2008) menjelaskan bahwa pada masa usia dini anak mengalami masa keemasan (*the golden years*) yang merupakan masa dimana anak mulai peka/sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosio emosional, agama dan moral.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan pada anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini tersebut menjadi dasar untuk

proses pendidikan selanjutnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini, seperti : Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis maupun Taman Kanak-kanak sangat tergantung pada sistem dan proses pendidikan yang dijalankan.

a. Hakikat Anak Berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Ia memiliki karakteristik yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa serta akan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya. Dalam hal ini anak merupakan seorang manusia atau individu yang memiliki pola perkembangan dan kebutuhan tertentu yang berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki berbagai macam potensi yang harus dikembangkan. Meskipun pada umumnya anak memiliki pola perkembangan yang sama, tetapi ritme perkembangannya akan berbeda satu sama lainnya karena pada dasarnya anak bersifat individual.

Ditinjau dari segi usia, Morrison (1988) mengatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang usia 0-8 tahun. Standar usia ini adalah acuan yang digunakan oleh NAEYC (*National Assosiation Education for Young Child*). Menurut definisi ini anak usia dini merupakan kelompok yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak usia dini adalah individu unik yang memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut.

Morrison (1988) menjelaskan anak usia dini terbagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu masa bayi dari usia lahir sampai 12 (dua belas) bulan, masa kanak-kanak/batita dari usia 1 sampai 3 tahun, masa prasekolah dari usia 3 sampai 5 tahun dan masa sekolah dasar dari usia 6 sampai 8 tahun. Setiap tahapan usia yang dilalui anak akan menunjukkan karakteristik yang berbeda. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak haruslah memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan. Apabila perlakuan yang diberikan tersebut tidak didasarkan pada karakteristik perkembangan anak, maka hanya akan menempatkan anak pada kondisi yang menderita.

b. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini

Pembukaan UUD 1945, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang dimiliki setiap anak. Amandemen UUD 1945, pasal 28 b ayat 2, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 31, ayat 1, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Bab I pasal 1 butir 14, menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Education For All (EFA) Jomtien-Thailand tahun 1990, menyatakan pemerintah bertekad untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi anak. Forum Pendidikan Dunia, Dakar-Sinegal tahun 2000, menyatakan semua negara bersepakat untuk memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. World Fit for Children (WFC) New York tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak harus memulai kehidupan dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

Ditinjau secara teoritik, Osborn dkk (sebagaimana dikutip dalam Maxim and George, 1993) mengungkapkan penelitian *neuroscience* bahwa kemampuan kecerdasan seseorang 50% telah tercapai ketika anak berusia 4 tahun, 30% pada usia 8 tahun, dan selebihnya 20% akan dicapai pada usia 17-18 tahun. Sejalan dengan hal ini, Spodek (1991) menjelaskan bahwa masa usia dini merupakan masa pembentukan dasar-dasar kepribadian seseorang yang kelak menjadi karakter di masa dewasanya. Bahwa kemampuan kecerdasan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yakni : gizi, kesehatan, dan pendidikan yang telah terjadi sejak masa prenatal, sehingga stimulasi pada anak usia dini harus diberikan secara holistik dan integratif.

#### c. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini

Secara umum tujuan PAUD adalah membantu anak untuk terus belajar sepanjang hayat guna menguasai keterampilan hidup. Tujuan tersebut seiring

dengan UU Sisdiknas yang berbunyi pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Direktorat PAUD (2008) menyatakan bahwa pembelajaran bagi anak usia dini bukan berorientasi pada sisi akademis saja. PAUD lebih dititikberatkan kepada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, bahasa, intelektual, sosial-emosi serta seluruh kecerdasan (kecerdasan jamak). Dengan demikian, PAUD yang diselenggarakan harus dapat mengakomodasi semua aspek perkembangan anak dalam suasana yang menyenangkan dan menimbulkan minat anak.

Secara umum tujuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan berdasarkan tinjauan aspek didaktis psikologis tujuan Pendidikan Anak Usia Dini yang utama adalah:

1. Menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar mampu menolong diri sendiri (*self help*), yaitu mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri seperti mampu merawat dan menjaga kondisi fisiknya, mampu mengendalikan emosinya dan mampu membangun hubungan dengan orang lain.
2. Meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar (*learning how to learn*). Hal ini sesuai dengan perkembangan paradigma baru dunia

pendidikan melalui empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together* yang dalam implementasinya di lembaga PAUD dilakukan melalui pendekatan *learning by playing*, belajar yang menyenangkan (*joyful learning*) serta menumbuh-kembangkan keterampilan hidup (*life skills*) sederhana sedini mungkin.

#### d. Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini Morrison and George (1988) menjelaskan beberapa fungsi pendidikan anak usia dini, yaitu :

##### 1. Fungsi Adaptasi

Berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Dengan anak berada di lembaga pendidikan anak usia dini, pendidik membantu mereka beradaptasi dari lingkungan rumah ke lingkungan sekolah. Anak juga belajar mengenali dirinya sendiri.

##### 2. Fungsi Sosialisasi

Berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari dimana ia berada. Di lembaga pendidikan anak usia dini anak akan bertemu dengan teman sebaya lainnya. Mereka dapat bersosialisasi, memiliki banyak teman dan mengenali sifat-sifat temannya.

### 3. Fungsi Pengembangan

Di lembaga pendidikan anak usia dini ini diharapkan dapat pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi atau lingkungan yang dapat menumbuhkembangkan potensi tersebut kearah perkembangan yang optimal sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun lingkungannya.

### 4. Fungsi Bermain

Berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain anak akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri.

#### e. Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat PAUD (2008) menjelaskan bahwa untuk memenuhi aspek-aspek dalam perkembangan anak baik aspek fisik, kognitif, sosial emosional dan bahasa serta aspek lainnya seperti agama dan moral, kemandirian dan seni, maka perlu dilakukan berbagai prinsip yang meliputi:

##### 1. Berorientasi pada kebutuhan anak

Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak secara individual. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik perkembangan fisik maupun psikis. Pendidik dan orang tua harus dapat melihat dan

membandingkan antara kemampuan yang dicapai anak pada usia tertentu dengan tingkat kemampuan yang seharusnya dicapai anak pada usia tersebut (sesuai tahap perkembangannya), sehingga pendidik diharapkan mampu menyediakan kegiatan-kegiatan main yang dapat meningkatkan kemampuan masing-masing anak.

## 2. Berpusat pada anak.

Dalam pembelajaran anak usia dini harus berorientasi pada minat dan kebutuhan anak secara individu maupun kelompok, dimana pendidik berfungsi sebagai fasilitator. Pembelajaran yang disusun tidak sekedar memenuhi harapan guru ataupun orang tua.

## 3. Dilaksanakan dalam suasana bermain

Piaget (sebagaimana dikutip dalam Spodek, 1991) menyatakan bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan/kepuasan bagi diri seseorang. Diharapkan melalui bermain dapat memberi kesempatan anak bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Selain itu melalui bermain dapat membantu anak mengenal tentang diri sendiri, dengan siapa ia hidup serta lingkungan tempat ia hidup. Bermain merupakan kebutuhan bagi anak, melalui bermain anak akan memperoleh pengetahuan. Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini, dengan menggunakan strategi, metode, materi/bahan dan media yang menarik agar mudah diikuti oleh anak.

#### 4. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang

Pembelajaran disusun bertahap dari yang mudah ke yang kompleks dengan memperhatikan tahap perkembangan anak. Pembelajaran dilakukan secara meningkat, jika anak telah menguasai materi di tingkat bawah, maka pembelajaran dapat dilanjutkan pada tingkat di atasnya hingga keseluruhan level dapat dikuasai. Pembelajaran anak usia dini akan efektif jika ada pengulangan-pengulangan materi. Semakin sering anak mendengar atau mendapat suatu informasi yang sama dalam kurun waktu tertentu, maka informasi tersebut akan semakin bertahan lama dalam ingatan anak.

#### 5. Merangsang semua indera

Pembelajaran terjadi saat anak berusaha memahami dunia di sekelilingnya dengan menggunakan seluruh inderanya. Orang dewasa yang ada di sekitarnya diharapkan dapat menyediakan lingkungan yang dapat merangsang anak untuk menggunakan seluruh inderanya sehingga anak dapat membangun pemahaman mereka sendiri terhadap dunia sekitarnya.

#### 6. Mengembangkan semua aspek kecerdasan

Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, baik jenis maupun tingkatannya. Kecerdasan yang dimaksud tidak hanya kecerdasan akademik, tetapi lebih luas dari itu. Pembelajaran untuk anak usia dini harus disusun dengan memperhatikan berbagai kecerdasan yang ada sehingga mampu mengembangkan semua aspek kecerdasan yang ada

pada anak. Oleh karena itu guru diharapkan dapat memfasilitasi anak dengan menyediakan berbagai kegiatan main yang dapat mengembangkan kecerdasan anak.

#### 7. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi

Proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang menarik dan membangkitkan rasa ingin tahu anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Kreativitas anak dapat dimunculkan jika kegiatan yang disajikan menantang dan menyenangkan karena anak bebas melakukan eksplorasi tanpa intervensi. Pembelajaran untuk anak dilakukan dengan pembaharuan program seiring perkembangan anak sehingga perlakuan yang diebrikan tidak sama untuk setiap anak.

#### 8. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk membantu anak mengembangkan potensi secara optimal sehingga anak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan. Banyak bahan alam yang dapat digunakan sebagai media dan sumber belajar untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Bahan yang ada di lingkungan sangat mudah didapat dan harganya murah.

#### 9. Menggunakan pembelajaran tematik dan terpadu.

Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Pembelajaran tematik diajarkan pada anak karena pada umumnya mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (*holistic*). Contohnya, perkembangan fisiknya tidak pernah dapat dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional.

### 5. Program Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

Dinas Kesehatan (2012) menjelaskan bahwa program Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) merupakan program pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa lima tahun pertama kehidupan, diselenggarakan dalam bentuk kemitraan antara keluarga (orang tua, pengasuh anak dan anggota keluarga lainnya), masyarakat (kader, tokoh masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat) dengan tenaga professional (kesehatan, pendidikan dan sosial).

#### a. Stimulasi Tumbuh Kembang

Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal (Kemenkes, 2010). Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu

dan ayah yang merupakan orang terdekat dengan anak, pengganti ibu/pengasuh anak, anggota keluarga lain dan kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga masing-masing dan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak bahkan gangguan yang menghambat perkembangan anak. Intervensi dini penyimpangan perkembangan adalah tindakan tertentu pada anak yang perkembangan kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan umurnya. Penyimpangan perkembangan bisa terjadi pada salah satu atau lebih kemampuan anak yaitu kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian anak.

Lebih lanjut, dalam Kemenkes (2010) dijelaskan kemampuan dasar anak yang dirangsang dengan stimulasi terarah adalah kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu :

- (1) Stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang.
- (2) Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengannya.
- (3) Berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak.
- (4) Lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain , bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman.
- (5) Lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap ke 4 aspek kemampuan dasar anak.

- (6) Gunakan alat bantu/permainan sederhana, aman dan ada di sekitar anak.
  - (7) Berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan.
  - (8) Anak selalu diberi pujian bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya.
- (Kemenkes, 2010).

b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang

Deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan/pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah (Kemenkes, 2010). Dengan ditemukan secara dini penyimpangan/masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan, tenaga kesehatan juga mempunyai waktu dalam membuat rencana tindakan/intervensi yang tepat terutama ketika harus melibatkan ibu/keluarga.

Dalam Pedoman Pelaksanaan SDIDTK di tingkat pelayanan kesehatan dasar (Kemenkes, 2010) dijelaskan bahwa ada tiga jenis deteksi dini tumbuh kembang yang dapat dikerjakan oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan jaringannya, berupa :

- (1) Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan yaitu untuk mengetahui /menemukan status gizi kurang/buruk dan mikro/makrosefali.
- (2) Deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak (keterlambatan), gangguan daya lihat, gangguan daya dengar.

(3) Deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.

c. Intervensi dan Rujukan Dini Penyimpangan Tumbuh Kembang

Penyimpangan/masalah perkembangan pada anak dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya tingkat kesehatan dan status gizi anak di samping pengaruh lingkungan hidup dan tumbuh kembang anak yang juga merupakan salah satu faktor dominan.

Intervensi dini penyimpangan perkembangan adalah tindakan tertentu pada anak yang perkembangan kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan umurnya. Penyimpangan perkembangan bisa terjadi pada salah satu atau lebih kemampuan anak yaitu kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian anak (Kemenkes, 2010). Tindakan intervensi dini tersebut berupa stimulasi perkembangan terarah yang dilakukan secara intensif di rumah selama dua minggu yang diikuti dengan evaluasi hasil intervensi stimulasi perkembangan.

Kemenkes (2010) lebih lanjut menjelaskan rujukan dini penyimpangan perkembangan anak diperlukan jika masalah/penyimpangan perkembangan anak tidak dapat ditangani meskipun sudah dilakukan tindakan intervensi dini. Rujukan penyimpangan tumbuh kembang dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat keluarga dan masyarakat, puskesmas dan jaringannya, rumah sakit rujukan.

d. Sasaran program SDIDTK

Sasaran program ini terdiri dari :

1. Sasaran langsung : semua anak umur 0 sampai 6 tahun
2. Sasaran tidak langsung
  - 1) Tenaga kesehatan yang bekerja di lini terdepan (dokter, bidan perawat, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat, dan sebagainya).
  - 2) Tenaga pendidik, petugas lapangan KB, petugas sosial yang terkait dengan pembinaan tumbuh kembang anak.
  - 3) Petugas sektor swasta dan profesi lainnya.

Program SDIDTK bertujuan agar semua balita umur 0–5 tahun dan anak pra sekolah umur 5–6 tahun tumbuh kembang secara optimal, terselenggaranya rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak bisa ditangani di Puskesmas (Dewi, 2009).

**B. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

| No | Penelitian dan tahun                    | Judul dan Penulis   | Hasil   |
|----|---|---|---|
| 1  | Penelitian Analitik Observasional, 2014 | Dampak Program Bina Keluarga Balita (BKB) Terhadap Tumbuh Kembang Anak Balita 6-24 Bulan oleh Andri Wahyuni dkk | Terdapat perbedaan pola asuh gizi, pola asih, pola asah dan tumbuh kembang antara anak balita 6-24 bulan pada keluarga peserta dan bukan peserta Bina Keluarga Balita (BKB) |
| 2  | Penelitian Tindakan, 2011               | Peningkatan Kualitas Pos PAUD Melalui Pengembangan  | Pelatihan program PAUD holistik integratif dapat meningkatkan kualitas Pos  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   | Program Holistik Integratif oleh Arri Handayani dkk  | PAUD  |
| 3 | Penelitian Riset dan pengembangan, 2013 | Desain Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif PAUD Non Formal oleh Anita Candra Dewi S dkk  | Dengan desain holistik integratif kemampuan orang tua tentang pengetahuan gizi, kesehatan, pengasuhan serta pendidikan anak secara holistik integratif lebih meningkat dibandingkan dengan menggunakan pelayanan posyandu secara sendiri-sendiri tidak terintegrasi dengan BKB dan Pos PAUD.  |
| 4 | Penelitian Tesis, 2014                  | Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang oleh Kiani Kiam                      | Implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kecamatan Sintang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yayasan atau organisasi, masih belum sinergis antara pemerintah, pengelola lembaga PAUD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol secara bersama, banyak PAUD di Kecamatan belum sesuai dengan kualifikasi sebagai pendidik, dikarenakan minimnya lulusan Sarjana untuk PAUD |
| 5 | Penelitian Tesis, 2009                  | Analisis Pelaksanaan Program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Balita dan Anak Pra Sekolah di Puskesmas di Kota Semarang | Fungsi pengorganisasian dan penggerakan belum maksimal dilakukan, masih terdapat factor penghambat pelaksanaan program SDIDTK di Puskesmas seperti masih ada penanggung jawab program SDIDTK yang belum pernah  |

|  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
|  |  | Tahun 2009 oleh Dewi Maritalia | mendapatkan pelatihan SDIDTK, belum tersosialisasinya program SDIDTK di Puskesmas dan jaringannya dengan baik dan benar, fasilitas pendukung pelaksanaan program SDIDTK di Puskesmas masih belum memadai dan kurangnya dukungan dari Kepala Puskesmas untuk pelaksanaan Program ini di Puskesmas sehingga tujuan akhir program belum tercapai seperti yang diharapkan. |
|--|--|--------------------------------|--|

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan topik dan sasaran pada BKB, PAUD, dan SDIDTK, baik pada aspek kebijakan maupun pada implementasi kebijakan dan program. Perbedaan mendasar pada sasaran penelitian, di mana dalam penelitian ini dilakukan pada keterpaduan antara BKB, PAUD dan SDIDTK sebagai suatu kebijakan. Penelitian terdahulu banyak mengeksplorasi data secara kuantitatif sedang penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

### C. Alur Pemikiran

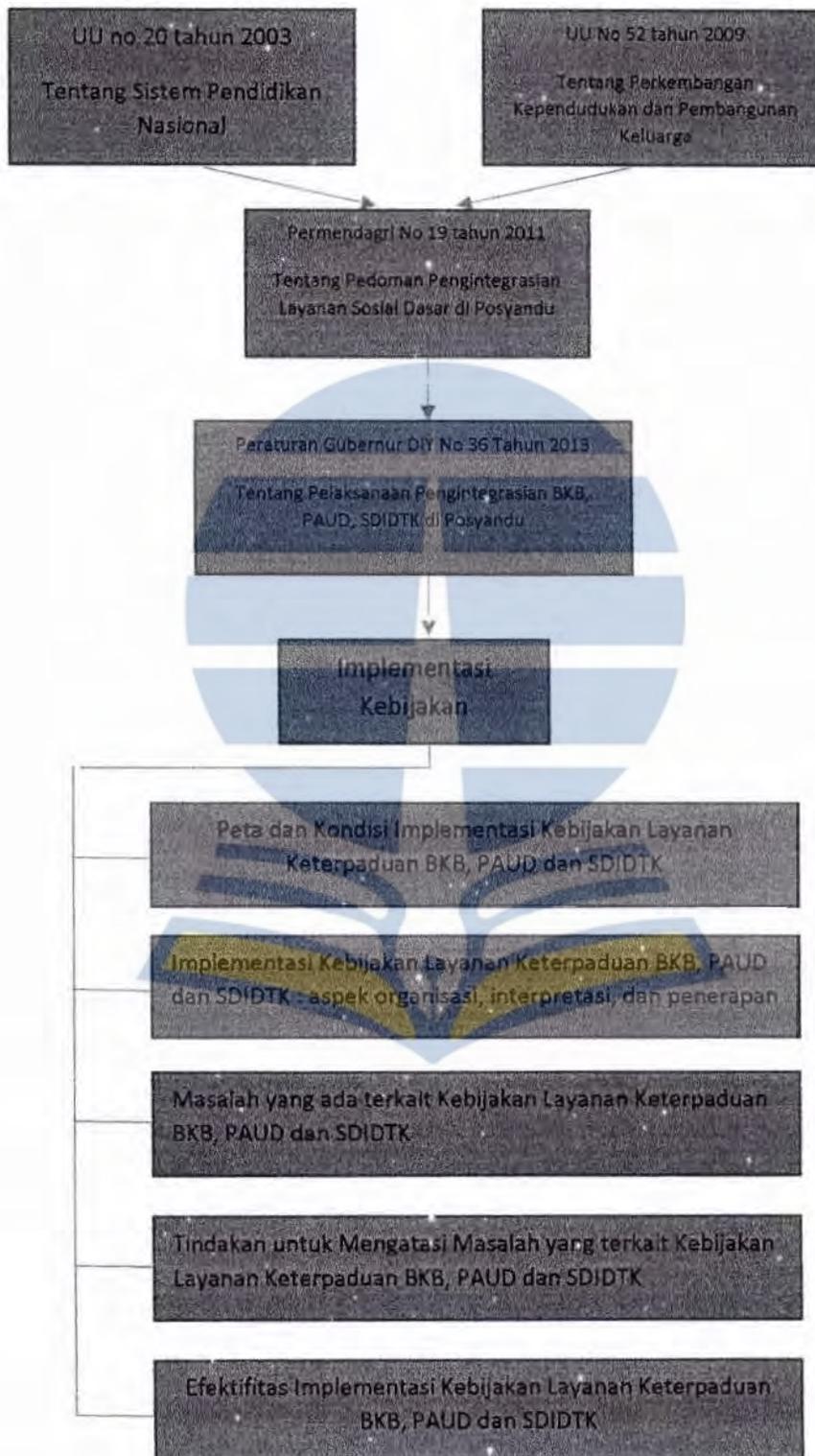
Pemerintah meluncurkan kebijakan layanan bagi anak usia yang tertian dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI nomor 52 th 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada dataran teknis, kebijakan ini diatur dalam Permendagri Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial dasar di Posyandu dan Peraturan Gubernur DIY

No 36 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengintegrasian Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak usia Dini dan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang di Pos Pelayanan Terpadu.

Sebagai sebuah kebijakan publik, tentunya perlu untuk dilakukan analisis pada implementasinya, apakah kebijakan publik itu relevan atau tidak bagi kemanfaatan masyarakat. Analisis dilakukan menyangkut aspek-aspek sebagai berikut :

1. Peta dan kondisi implementasi kebijakan
2. Strategi implementasi kebijakan
3. Masalah yang ada berkaitan dengan kebijakan
4. Tindakan apa saja yang diambil untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan
5. Sejauhmana efektivitas tindakan tersebut untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan

Alur pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut :



Gambar 1.1 Alur Pemikiran

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang diteliti atau fokus penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

#### B. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan bagian dari metode penelitian yang berisikan uraian mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Desain penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Herdiansyah (2012), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pendapat hampir sama disampaikan oleh Sugiyono (2015), yang menyampaikan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun untuk pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan studi kasus. Creswell (2016) menyatakan bahwa studi kasus merupakan rancangan

penelitian di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, seringkali program, peristiwa, aktivitas, proses, atas satu individu atau lebih. Creswell (dalam Herdiansyah, 2012) menyatakan bahwa studi kasus (*case study*) adalah suatu metode yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang terbatas (*bounded system*) pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalan data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks. Studi kasus adalah model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara lebih mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (berbatas waktu).

Desain penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan diteliti adalah implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

### C. Sumber Data dan Informan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau diperoleh dari pengamatan suatu kegiatan dan tempat tertentu. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang telah disahkan atau telah

dipublikasikan. Dengan demikian sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa orang, dokumen, kegiatan, dan tempat.

Pemilihan informan menggunakan teknik pemilihan informan purposive, sumber dinilai mempunyai informasi yang diperlukan. Informan adalah orang yang dipandang mempunyai pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu. Kualifikasi tersebut dimiliki oleh orang yang bersangkutan, baik karena kedudukannya sebagai orang yang berwenang pada jabatan tertentu maupun karena kegiatannya dalam proses dibidang tertentu. Orang tersebut dipilih dengan cara purposive untuk dijadikan informan dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan yang terdiri dari :

1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Seksi Keluarga Berencana di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul.
3. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul. Informan PKB sebanyak 18 orang dari 18 kecamatan yang ada,

terdiri dari 1 orang koordinator PKB atau 1 orang PKB pengampu wilayah keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK di masing-masing kecamatan.

4. Pengelola lembaga keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Data sekunder diperoleh dari dokumen yang telah disahkan di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2014), lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di dalam lingkup wilayah Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan instansi/kelembagaan tersebut merupakan stakeholder dan leading sektor dari implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK. Lingkup wilayah mencakup 18 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

## E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada saat *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2015 : 61).

Nasution (dalam Sugiyono, 2015 : 60) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesa yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan pasti sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Wawancara kualitatif

Menurut Creswell (2016) wawancara kualitatif adalah ketika peneliti dapat melakukan wawancara berhadapan dengan partisipan, mewawancarai

mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai 8 partisipan per kelompok. Wawancara seperti ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

## 2. Observasi kualitatif

Creswell (2016) menyatakan bahwa observasi kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi terstruktur aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.

## 3. Studi Dokumentasi

Menurut Herdiansyah (2012), studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Creswell (2016) menyatakan bahwa dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, diari, surat, email). Instrumen pengumpulan data yang digunakan : diri peneliti, panduan wawancara, perekam, kamera, dan alat tulis menulis.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik atau metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Creswell. Menurut Creswell (2016), ada enam langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

### 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

### 2. Membaca keseluruhan data, untuk membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

### 3. Memulai coding semua data, merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (atau bagian teks dan gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas.

### 4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis.

### 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

### 6. Pembuatan interpretasi atau memaknai data

## H. Pengujian Keabsahan Data (Validitas dan Reliabilitas)

Gibbs (sebagaimana dikutip dalam Creswell, 2016) menyatakan bahwa validitas merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Sementara itu reliabilitas

mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti yang lain untuk proyek yang berbeda.

Mengacu pada pendapat Creswell (2016), pada penelitian ini validitas dan realibilitas data diuji melalui beragam strategi, yaitu :

1. Mentriangulasi sumber data informan yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian, dengan cara membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat.
3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul**

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul dengan Ibu Kota Wonosari, merupakan kabupaten dengan bentang luas wilayah administrasi terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar 1.485,36 km<sup>2</sup> atau 46,63 persen dari seluruh wilayah daratan Provinsi DIY. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 7°46' LS-8°09' LS dan 110°21' BT-110°50' BT. Gambaran wilayah secara administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada gambar peta di bawah, menunjukkan batas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang dapat dirinci sebagai berikut.

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan satuan fisiografis Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu.

1. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 m – 700 m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6 m – 12 m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara.
2. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 m – 200 m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur, sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, meskipun airnya kering di musim kemarau. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m – 120m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara.
3. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0 m – 300 m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah serta telaga genangan air hujan. Zona Selatan ini meliputi Kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari,

Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan.

Kondisi alam Gunungkidul yang berbukit-bukit mempengaruhi pola permukiman penduduk yang cenderung memusat dan berkelompok (*agglomerated rural settlement*). Permukiman penduduk hampir seluruhnya merupakan permukiman pedesaan kecuali yang berada di Kecamatan Wonosari dan Playen khususnya Desa Wonosari, Kepek dan Baleharjo di Kecamatan Wonosari serta Desa Logandeng dan Ngawu yang ada di Kecamatan Playen.

Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 144 (seratus empat puluh empat).

Tabel 4.1 Kondisi Kecamatan dan Desa di Kabupaten Gunungkidul

|           |                    |                 |               |            |              |              |
|-----------|--------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Panggang</b>    | <b>99,8</b>     | <b>6,72</b>   | <b>6</b>   | <b>44</b>    | <b>44</b>    |
| <b>2</b>  | <b>Purwosari</b>   | <b>71,76</b>    | <b>4,83</b>   | <b>5</b>   | <b>32</b>    | <b>32</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Paliyan</b>     | <b>58,07</b>    | <b>3,91</b>   | <b>7</b>   | <b>50</b>    | <b>50</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Saptosari</b>   | <b>87,83</b>    | <b>5,91</b>   | <b>7</b>   | <b>60</b>    | <b>60</b>    |
| <b>5</b>  | <b>Tepus</b>       | <b>104,91</b>   | <b>7,06</b>   | <b>5</b>   | <b>83</b>    | <b>84</b>    |
| <b>6</b>  | <b>Tanjungsari</b> | <b>71,63</b>    | <b>4,82</b>   | <b>5</b>   | <b>72</b>    | <b>71</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Rongkop</b>     | <b>83,46</b>    | <b>5,62</b>   | <b>8</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>8</b>  | <b>Girisubo</b>    | <b>94,57</b>    | <b>6,37</b>   | <b>8</b>   | <b>82</b>    | <b>82</b>    |
| <b>9</b>  | <b>Semanu</b>      | <b>108,39</b>   | <b>7,30</b>   | <b>5</b>   | <b>106</b>   | <b>136</b>   |
| <b>10</b> | <b>Ponjong</b>     | <b>104,49</b>   | <b>7,03</b>   | <b>11</b>  | <b>119</b>   | <b>120</b>   |
| <b>11</b> | <b>Karangmojo</b>  | <b>80,12</b>    | <b>5,39</b>   | <b>9</b>   | <b>104</b>   | <b>104</b>   |
| <b>12</b> | <b>Wonosari</b>    | <b>75,51</b>    | <b>5,08</b>   | <b>14</b>  | <b>103</b>   | <b>151</b>   |
| <b>13</b> | <b>Playen</b>      | <b>105,26</b>   | <b>7,09</b>   | <b>13</b>  | <b>101</b>   | <b>101</b>   |
| <b>14</b> | <b>Patuk</b>       | <b>72,04</b>    | <b>4,85</b>   | <b>11</b>  | <b>72</b>    | <b>82</b>    |
| <b>15</b> | <b>Gedangsari</b>  | <b>68,14</b>    | <b>4,59</b>   | <b>7</b>   | <b>67</b>    | <b>67</b>    |
| <b>16</b> | <b>Nglipar</b>     | <b>73,87</b>    | <b>4,97</b>   | <b>7</b>   | <b>53</b>    | <b>53</b>    |
| <b>17</b> | <b>Ngawen</b>      | <b>46,59</b>    | <b>3,14</b>   | <b>6</b>   | <b>67</b>    | <b>67</b>    |
| <b>18</b> | <b>Semin</b>       | <b>78,92</b>    | <b>5,31</b>   | <b>10</b>  | <b>116</b>   | <b>121</b>   |
|           | <b>Jumlah</b>      | <b>1.485,36</b> | <b>100,00</b> | <b>144</b> | <b>1.431</b> | <b>1.525</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, (Gunungkidul Dalam Angka 2015)

## **B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD)**

### **1. Pengertian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pasal 2 dijelaskan bahwa dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD)**

Pada pasal 3 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa.

### **3. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD)**

Pada pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- f. pelaksanaan pembinaan peningkatan peran, partisipasi, dan perlindungan perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, partisipasi, sarana, dan prasarana serta usaha ekonomi desa dan masyarakat;
- i. pelaksanaan pembinaan pemerintah desa;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- m. pengelolaan UPT.

#### 4. Struktur dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
  1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  2. Seksi Perlindungan Anak;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
  1. Seksi Pengendalian Penduduk;

2. Seksi Keluarga Berencana;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Partisipasi;
  2. Seksi Usaha Perekonomian Masyarakat Desa;
- e. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:
1. Seksi Kekayaan Desa;
  2. Seksi Keuangan Desa;
  3. Seksi Bina Administrasi dan Perangkat Desa.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016).

Selanjutnya pada pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
- b. Seksi Keluarga Berencana.

Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun tugas Seksi Pengendalian Penduduk adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pengendalian Penduduk;

- d. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi strategi pengendalian penduduk;
- e. melaksanakan fasilitasi penyusunan parameter kependudukan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan kajian dan analisis dampak kependudukan;
- g. melaksanakan pendidikan kependudukan;
- h. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi kependudukan;
- i. melaksanakan penguatan program kependudukan;
- j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pengendalian Penduduk;
- k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian penduduk; dan
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk.

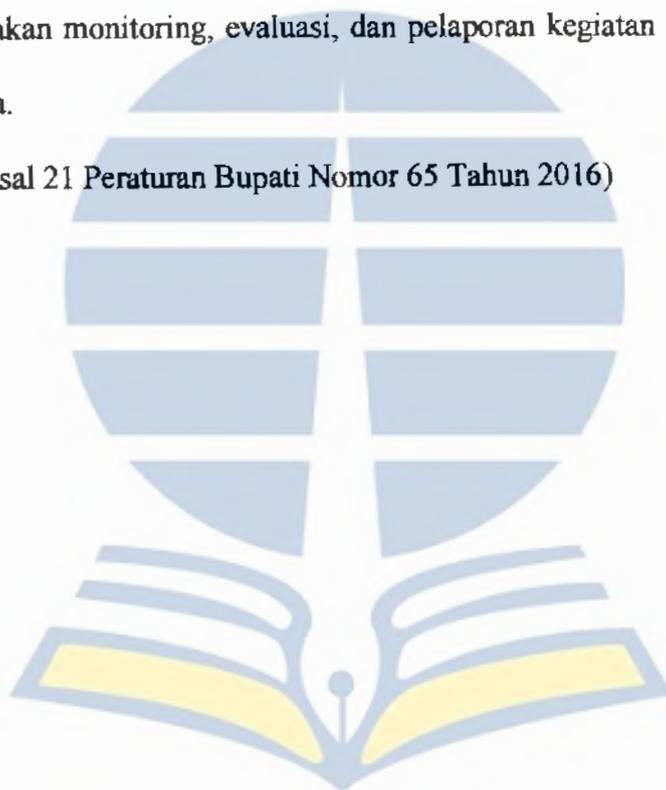
(pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016)

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keluarga Berencana;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan partisipasi;
- e. melaksanakan pelayanan keluarga berencana;
- f. melaksanakan penyuluhan keluarga berencana;
- g. melaksanakan advokasi keluarga berencana;
- h. melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;

- i. melaksanakan pembinaan kesehatan reproduksi remaja;
- j. melaksanakan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang keluarga berencana;
- k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Keluarga Berencana;
- l. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang keluarga berencana; dan
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Keluarga Berencana.

(pasal 22 (pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016)



Pada kelompok BKB Al Ma'ruf Desa Nglipar Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan dilaksanakan sebulan sekali, di mana layanan PAUD dilaksanakan terpadu dengan layanan BKB. Adapun layanan SDIDTK dilakukan terpisah di waktu yang berbeda di Posyandu. Berbeda dengan kelompok BKB Al Ma'ruf, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Baitul Hikmah Desa Mulusan Kecamatan Paliyan. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.

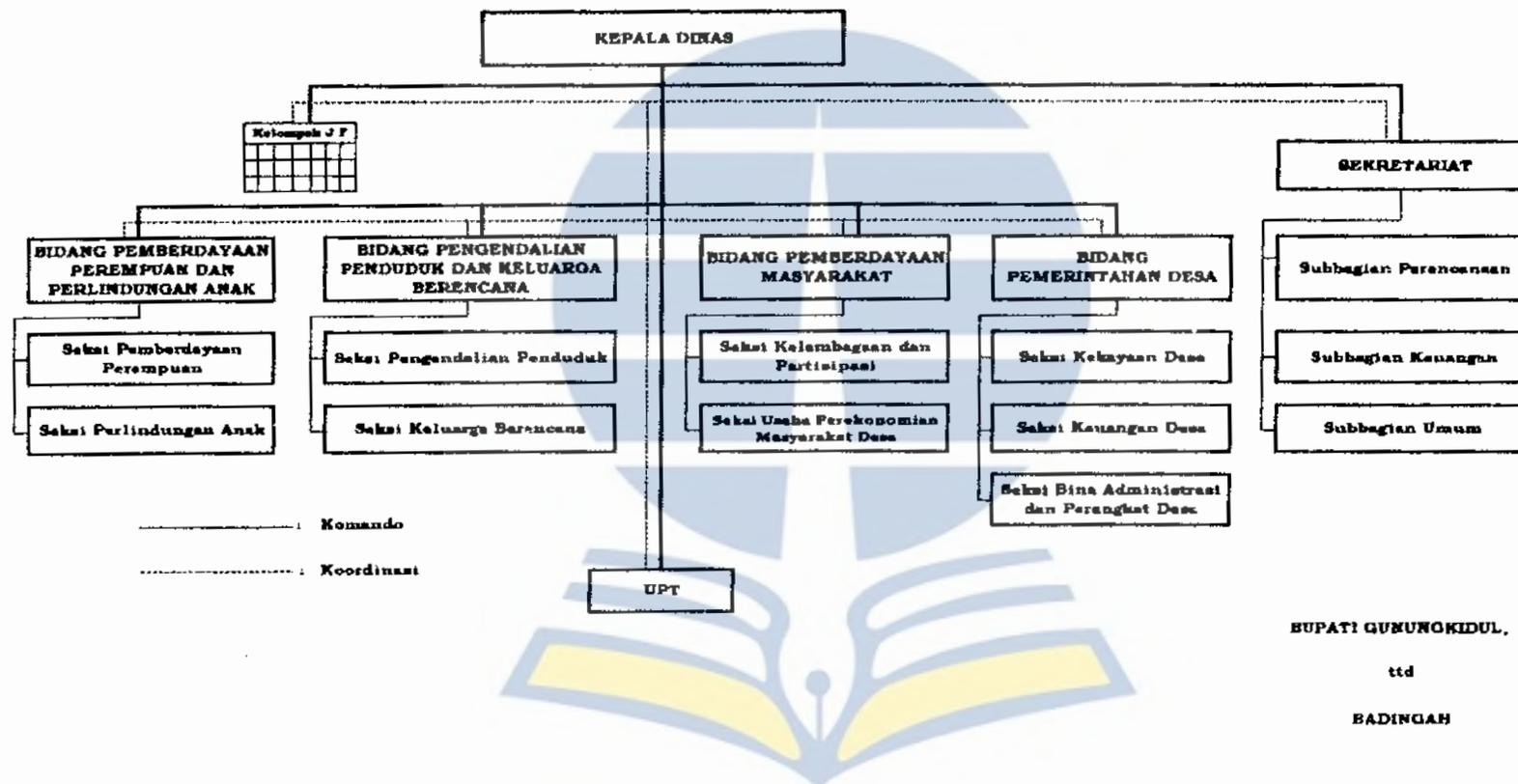
Berdasarkan data-data tiap kelompok tersebut di atas, peta pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul merata di semua kecamatan tetapi belum menjangkau sasaran di semua desa. Kondisi pelaksanaan layanan keterpaduan di sebagian besar kecamatan belum memenuhi standar operasional yang ada.

#### **E. Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul**

Untuk mendapatkan informasi tentang strategi implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK, peneliti telah melakukan

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 65 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



### C. Gambaran Umum Informan Penelitian

Untuk keperluan analisis penelitian, pada sub bab berikut diuraikan sekilas tentang gambaran umum informan penelitian, antara lain mengenai umur informan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

#### 1. Umur Informan

Berdasarkan data yang diperoleh, umur terendah informan adalah 30 tahun, umur tertinggi adalah 55 tahun. Umur antara 35 s.d 44 tahun merupakan jumlah informan terbanyak pertama yakni 40%, diikuti informan yang berumur 45-54 tahun sebanyak 30%, informan usia 30-35 tahun sebanyak 20%, dan informan usia 55 tahun ke atas sebanyak 10%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Komposisi Informan Berdasarkan Umur

| No    | Rentang Umur (tahun) | Jumlah Informan (jiwa) | Persentase (%) |
|-------|----------------------|------------------------|----------------|
| 1     | 30 – 34 tahun        | 8                      | 20             |
| 2     | 35 – 44 tahun        | 16                     | 40             |
| 3     | 45 – 54 tahun        | 12                     | 30             |
| 4     | 55 tahun ke atas     | 4                      | 10             |
| Total |                      | 40                     | 100            |

Sumber : Data primer terolah tahun 2017

#### 2. Jenis kelamin informan

Tabel 4.3 Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

| No    | Jenis Kelamin | Jumlah Informan (jiwa) | Persentase (%) |
|-------|---------------|------------------------|----------------|
| 1     | Laki-laki     | 12                     | 30             |
| 2     | Perempuan     | 28                     | 70             |
| Total |               | 40                     | 100            |

Sumber : Data primer terolah tahun 2017

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar (70%) informan berjenis kelamin perempuan. Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran wanita dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK cukup besar.

### 3. Pendidikan informan

Tabel 4.4 Komposisi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No    | Tingkat pendidikan | Jumlah Informan<br>(jiwa) | Persentase<br>(%) |
|-------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 1     | SLTA               | 24                        | 60                |
| 2     | Sarjana DIII/S1    | 12                        | 30                |
| 3     | Sarjana S2         | 4                         | 10                |
| Total |                    | 40                        | 100               |

Sumber : Data primer terolah tahun 2017

Dari tabel di atas, memperlihatkan persebaran informan berdasarkan tingkat pendidikan. Informan terbesar adalah pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 60%, berpendidikan Sarjana DIII/S1 sebanyak 30% dan yang berpendidikan S2 sebanyak 10%.

#### D. Peta dan Kondisi Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul

Kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Dalam pelaksanaan program layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK, terdapat 1 kelompok keterpaduan di masing-masing kecamatan. Persebaran kelompok keterpaduan di masing-masing kecamatan, bisa dilihat pada tabel berikut.

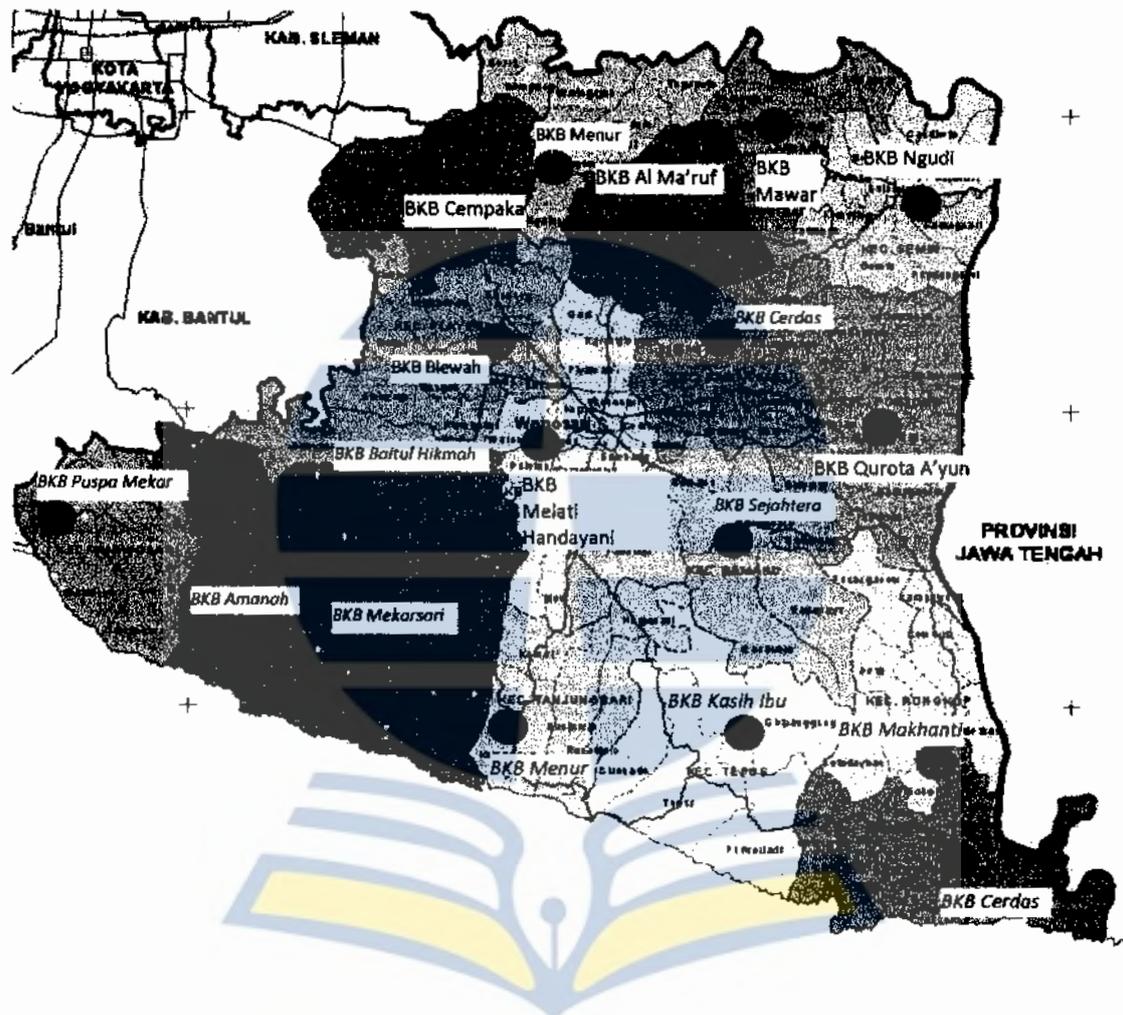
Tabel 4.5 Lokasi Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul

| NO  | NAMA KELOMPOK BKB    | LOKASI       |             |
|-----|----------------------|--------------|-------------|
|     |                      | DESA         | KECAMATAN   |
| 1.  | BKB Cempaka          | Patuk        | Patuk       |
| 2.  | BKB Mawar            | Kampung      | Ngawen      |
| 3.  | BKB Blewah           | Ngleri       | Playen      |
| 4.  | BKB Menur            | Hargosari    | Tanjungsari |
| 5.  | BKB Melati Handayani | Wonosari     | Wonosari    |
| 6.  | BKB Qurota A'yun     | Sumber Kidul | Ponjong     |
| 7.  | BKB Sejahtera        | Ngeposari    | Semanu      |
| 8.  | BKB Mekarsai         | Jetis        | Saptosari   |
| 9.  | BKB Menur            | Ngalang      | Gedangsari  |
| 10. | BKB Puspa Mekar      | Giricahyo    | Purwosari   |
| 11. | BKB Ngudi Rahayu     | Bendung      | Semin       |
| 12. | BKB Cerdas           | Tileng       | Girisubo    |
| 13. | BKB Amanah           | Girimulyo    | Panggang    |
| 14. | BKB Kasih Ibu        | Giripanggung | Tepus       |
| 15. | BKB Makanthi         | Bohol        | Rongkop     |
| 16. | BKB Cerdas           | Sumberejo    | Karangmojo  |
| 17. | BKB Al Ma'ruf        | Nglipar      | Nglipar     |
| 18. | BKB Baitul Hikmah    | Mulusan      | Paliyan     |

Sumber : Data primer terolah tahun 2017

Peta lokasi persebaran layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di masing-masing desa bisa dilihat pada peta berikut ini.

Peta 4.1 Peta lokasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Kabupaten Gunungkidul



Berdasarkan peta tersebut, persebaran layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul merata di semua wilayah kecamatan. Persebaran lokasi layanan belum menjangkau seluruh desa yang ada.

Kondisi pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK berbeda-beda di masing-masing lokasi. Berdasarkan wawancara dan observasi, terdapat tiga pola keterpaduan :

1. BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan terpadu di waktu dan tempat yang sama. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan.
2. BKB dan PAUD dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat yang sama sedang SDIDTK dilaksanakan terpisah di Posyandu pada waktu dan tempat yang berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan
3. BKB dan SDIDTK dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat yang sama sedang PAUD dilaksanakan terpisah pada waktu dan tempat yang berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan

Berdasarkan buku panduan pelaksanaan BKB, PAUD, SDIDTK (BPMPKB, 2013), standar operasional pelaksanaan kegiatan yang ideal adalah kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama. Dari data hasil penelitian diperoleh bahwa pola ideal baru dilakukan di 10 kelompok dari 18 kelompok layanan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pada dataran pelaksanaan program dan kegiatan di lini lapangan, kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum terlaksana secara optimal.

Pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di masing-masing lokasi yang diteliti menunjukkan kondisi yang beragam. Standar operasional pelaksanaan kegiatan yang ideal adalah kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama. Di BKB Cempaka Desa Patuk Kecamatan Patuk standar operasional ini sudah

terlaksana. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang. Pada kelompok BKB Mawar Desa Kampung Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan dilaksanakan 1-2 kali sebulan dengan keterpaduan pada layanan PAUD dan BKB. Adapun layanan SDIDTK dilaksanakan di Posyandu di waktu dan tempat yang berbeda.

Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Blewah Desa Ngleri Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Di kelompok ini, layanan SDIDTK dan BKB dilaksanakan bersamaan dan terpadu di Posyandu sebulan sekali sedangkan layanan PAUD dilaksanakan terpisah di lokasi lain dan di waktu yang berbeda juga. Walaupun demikian sudah terdapat koordinasi pada tingkat kader pelaksana untuk menguatkan keterpaduan program. Demikian juga di BKB Menur Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, standar operasional layanan belum bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan dengan operasional pelaksanaan di waktu yang sama dan di tempat yang sama dilakukan untuk layanan SDIDTK dan BKB sebulan sekali. Adapun layanan PAUD dilaksanakan pada hari yang berbeda di tempat yang berbeda pula.

Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Melati Handayani Desa Wonosari Kecamatan Wonosari. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang. Hal ini terjadi juga di BKB Qurota A'yun Desa Sumber Kidul Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Qurota A'yun Desa Sumber Kidul Kecamatan Ponjong. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.

Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Sejahtera Desa Ngeposari Kecamatan Semanu. Layanan keterpaduan dengan operasional pelaksanaan di waktu yang sama dan di tempat yang sama dilakukan sebulan sekali untuk layanan SDIDTK dan BKB. Adapun layanan PAUD dilaksanakan pada hari yang berbeda di tempat yang berbeda pula. Kondisi serupa terjadi di BKB Mekarsari Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Standar operasional pelaksanaan kegiatan

BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; cukup bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Mekarsari Desa Jetis Kecamatan Saptosari. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang. Kegiatan belum terlaksana dengan rapi karena jumlah kader tidak berimbang dengan jumlah sasaran dan sarana prasarana yang ada.

Pada kelompok BKB Menur Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.

Penggalian data di BKB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kondisi yang baik. Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan

berlangsung dari pagi sampai siang. Adapun di BKB Ngudi Rahayu Desa Bendung Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan PAUD dilaksanakan pada hari yang sama di tempat yang berbeda pada pagi hari. Selanjutnya layanan BKB dan SDIDTK di Posyandu dilaksanakan pada hari yang sama di waktu dan tempat yang berbeda.

Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Cerdas Desa Tileng Kecamatan Girisubo. Layanan keterpaduan PAUD dan BKB dilaksanakan sebulan 1-2 kali. Posyandu dilaksanakan pada hari yang sama di waktu dan tempat yang berbeda. Di sisi yang lain standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Amanah Desa Girimulyo Kecamatan Panggang. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.

BKB Kasih Ibu Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan BKB, PAUD,

SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.

BKB Makanthi yang berlokasi di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kelompok yang sedang dikembangkan untuk menjadi model di kecamatan. Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Makanthi Desa Bohol Kecamatan Rongkop. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang. Walaupun demikian kegiatan belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan jumlah kader yang tidak berimbang dengan jumlah sasaran. Kelompok ini juga belum stabil melaksanakan layanan tiap bulannya.

BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul merupakan BKB rintisan di Kecamatan Karangmojo. Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmojo. Layanan keterpaduan dilaksanakan sebulan sekali, di mana layanan PAUD dilaksanakan di gedung PAUD lalu setelahnya layanan BKB dilakukan bersama dengan SDIDTK di Posyandu.

pengumpulan data yang terdiri dari tiga aspek yaitu : pertama organisasi yang terdiri dari struktur organisasi, sumber daya manusia serta didukung perangkat hukum yang jelas, kedua interpretasi adalah pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, dan yang ketiga pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan.

### 1. Aspek Organisasi

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diperoleh data bahwa struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas tentang jabatan, tupoksi dan merupakan kerangka pedoman kerja bagi pegawai/pelaksana guna mengimplementasikan kebijakan sesuai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 tanggal 18 April 2017 menyatakan bahwa: semenjak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Ketentuan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terbentuklah Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Perubahan kelembagaan dari badan ke dinas memberi kejelasan aspek organisasi.

Implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK diampu oleh bidang pengendalian penduduk dan KB terutama pada seksi Keluarga Berencana dan pada pelaksanaan di lini lapangan berkoordinasi dengan rumpun jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

Selanjutnya wawancara dengan informan 2 pada tanggal 21 April 2017 menyatakan bahwa struktur organisasi sudah ada, sejak penataan kelembagaan dan pejabat pada bulan Januari 2017, organisasi menjadi makin rapi. Terdapat masalah terkait implementasi kebijakan di lini lapangan, di mana sumber daya manusia masih terbatas. Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) belum berimbang dengan jumlah desa yang ada. Selain itu kader BKB yang terlatih juga masih terbatas.

Dari wawancara dengan informan 1 dan informan 2 ini diperoleh data bahwa dari sisi organisasi struktur organisasi sudah tertata berikut tugas dan fungsinya. Adapun pada sisi sumber daya manusia, dukungannya belum optimal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Wawancara dengan beberapa informan yang lain dari lini lapangan (para PKB) menyatakan bahwa pada aspek regulasi, implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum didukung oleh peraturan yang jelas di tingkat kahupaten. Belum ada Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati yang mengatur implementasi kebijakan ini di lini lapangan.

Menurut para informan dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK diperlukan kader yang memiliki pemahaman tentang perkembangan anak usia dini secara holistik integratif serta pengetahuan tentang

pengelolaan layanan keterpaduan ini. Pada kenyataannya pelaksanaan layanan keterpaduan dilaksanakan oleh para kader yang sebagian besar belum terlatih. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan 21 selaku kader (tanggal 2 Mei 2017) yang disetujui oleh beberapa informan kader dari kelompok lain. Informan 21 mengatakan:

*“Ya... selama ini pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilakukan oleh para para kader. Kegiatan dilaksanakan sebulan sekali. Di kelompok kami ada 10 kader, yang terlatih baru 2 orang. Modalnya semangat dan kesungguhan mengabdikan ke masyarakat”.*

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang berada di pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK masih terbatas. Jumlah PNS PKB terbatas, di mana 1 PKB bisa mengampu 1-3 desa. Selain itu sumber daya kader yang telah mendapatkan pelatihan juga terbatas.

Adapun di lokasi pelaksanaan kegiatan, berdasar hasil pengamatan dan analisa data diperoleh gambaran yang berbeda-beda. BKB Cempaka Desa Patuk Kecamatan Patuk memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 orang dengan 3 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan

edukatif. BKB Mawar Desa Kampung Kecamatan Ngawen memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 orang tetapi belum memiliki kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Sarana prasarana yang dimiliki tersebut belum terpadu masih menjadi milik masing-masing layanan.

BKB Blewah Desa Ngleri Kecamatan Playen memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 9 orang dengan 5 kader inti dan baru 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Sarana prasarana yang dimiliki tersebut belum terpadu masih menjadi milik masing-masing layanan.

BKB Menur Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 10 orang belum memiliki kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Sarana prasarana yang dimiliki tersebut belum terpadu masih menjadi milik masing-masing layanan.

BKB Melati Handayani Desa Wonosari Kecamatan Wonosari memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan juga ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 9 orang dengan 5 kader inti dan semua kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. BKB Qurota A'yun Desa Sumber Kidul Kecamatan Ponjong memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader

sebagai tenaga pelaksana ada 9 orang dengan 5 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif.

Pada kelompok BKB Sejahtera Desa Ngeposari Kecamatan Semanu memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 orang dengan 6 kader terorientasi dan baru 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Sebagian perlengkapan yang dimiliki sudah rusak dan tidak layak pakai.

BKB Mekarsari Desa Jetis Kecamatan Saptosari memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 orang 6 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai

media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Adapun BKB Menur Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 9 orang dan baru 2 kader terlatih. Sebagian kader sudah pernah mendapatkan orientasi kegiatan. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif.

BKB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 5 orang belum ada kader terlatih, tapi semua kader sudah pernah mendapatkan orientasi kegiatan. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. BKB Ngudi Rahayu Desa

Bendung Kecamatan Semin memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 orang sudah pernah mendapatkan orientasi kegiatan dan baru 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Sarana prasaran yang dimiliki tersebut belum terpadu masih menjadi milik masing-masing layanan.

Kelompok BKB Cerdas Desa Tileng Kecamatan Girisubo memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 13 orang dengan 5 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Kelompok yang lain adalah BKB Amanah Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. BKB Amanah Desa Girimulyo Kecamatan Panggang memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 10 orang, 6 orang sudah mendapatkan orientasi kegiatan dan baru 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif.

BKB Kasih Ibu Desa Giripanggung Kecamatan Tepus memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 5 orang sudah pernah mengikuti kegiatan orientasi program. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Kondisi berbeda ada di BKB Makanthi Desa Bohol Kecamatan Rongkop yang memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 14 orang dengan 4 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat

sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif.

BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmojo belum memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 8 orang. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Sarana prasarana yang dimiliki tersebut belum terpadu masih menjadi milik masing-masing layanan. BKB Al Ma'ruf Desa Nglipar Kecamatan Nglipar memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 14 orang dan baru 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif.

BKB Baitul Hikmah Desa Mulusan Kecamatan Paliyan memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 5 orang dengan 4 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif.

## 2. Interpretasi

Dalam hal interpretasi maka yang ingin dilihat adalah apakah pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Berdasarkan wawancara dengan informan kader pelaksana, diperoleh data bahwa di semua lokasi keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK sudah mendapatkan BKB kit yang berisi buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan, serta alat permainan edukatif. Dalam pelaksanaan kegiatan, kader berusaha melaksanakan sesuai panduan dan petunjuk pelaksanaan. Panduan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan itu sudah dimiliki oleh semua kelompok.

Berdasar hasil pengamatan dan analisa data diperoleh gambaran bahwa kelompok yang sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan adalah :BKB Cempaka Desa Patuk Kecamatan Patuk, BKB Melati Handayani Desa Wonosari Kecamatan Wonosari, BKB Qurota A'yun Desa Sumber Kidul Kecamatan Ponjong, BKB Mekarsari Desa Jetis Kecamatan Saptosari, BKB Menur Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari, BKB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari, BKB Amanah Desa Girimulyo Kecamatan Panggang, BKB Kasih Ibu Desa Giripanggung Kecamatan Tepus, BKB Makanthi Desa Bohol Kecamatan Rongkop, BKB Baitul Hikmah Desa Mulusan Kecamatan Paliyan.

Adapun kelompok yang masih memiliki keterbatasan dan belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan adalah : BKB Mawar Desa Kampung Kecamatan Ngawen, BKB Blewah Desa Ngleri Kecamatan Playen, BKB Menur Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari, BKB Sejahtera Desa Ngeposari Kecamatan Semanu, BKB Ngudi Rahayu Desa Bendung Kecamatan Semin, BKB Cerdas Desa Tileng Kecamatan Girisubo, BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmojo, BKB Al Ma'ruf Desa Nglipar Kecamatan Nglipar.

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan disini dimaksudkan apakah peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk dapat melihat hasil ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur

kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan dalam melaksanakan kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK tersebut. Dari hasil wawancara dengan kader pelaksana dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan kegiatan baru sebagian yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berbagai keterbatasan karena masing-masing personil belum sepenuhnya paham ketugasannya dan di beberapa lokasi jumlah kader tidak proporsional dibanding jumlah sasaran.

Berdasarkan pengamatan peneliti jumlah tenaga kader yang terlatih dan memiliki ketrampilan dalam pengelolaan kelompok masih sangat kurang. Selain itu hampir semua kelompok belum memiliki program kerja yang terstruktur. Jadwal kegiatan sudah ada tetapi tidak tertib dilaksanakan. Hanya 7 dari 18 kelompok keterpaduan yang ada yang tertib dan disiplin melaksanakan program sesuai jadwal. Prosedur kerja dan program kerja layanan keterpaduan yang merupakan rumusan kelompok di 18 kelompok belum tersusun.

#### **F. Masalah Yang Ada Terkait Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK**

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan kepada informan Penyuluh KB, berbagai permasalahan ditemui dalam implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh para kader yang sebagian besar belum mendapatkan pelatihan intensif. Terjadi regenerasi kader di mana kader terlatih sebagian sudah tidak aktif

lagi. Selain itu belum ada regulasi berupa peraturan daerah atau keputusan Bupati yang mengatur secara legal formal segala hal terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini memberi dampak pada lemahnya kekuatan kebijakan dan dukungan anggaran pada implementasi kegiatan di lini lapangan.

Permasalahan lain yang ditemui menyangkut lemahnya koordinasi dan konsolidasi lintas sektor yang terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul; di mana dalam dataran teknis kebijakan ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah DP3AKBPMD, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, dan TP PKK. Rendahnya daya dukung anggaran dari pemerintah untuk terlaksananya implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Sumber daya manusia pelaksana implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK masih terbatas baik pada sisi kualitas maupun kuantitas, baik di jajaran organisasi perangkat daerah, petugas fungsional di lini lapangan, maupun kader pelaksana di masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam wawancara tanggal 3 Mei 2017, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyatakan belum adanya produk perundangan berupa peraturan daerah sebagai salah satu masalah utama dalam implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

Pada lini lapangan pelaksanaan kegiatan di kelompok-kelompok kegiatan, kader pelaksana di kelompok BKB menyebutkan berbagai masalah yang ditemui sebagai berikut :

Tabel 4.6 Permasalahan yang ditemui kelompok

| NO | NAMA KELOMPOK BKB    | PERMASALAHAN   |
|----|----------------------|--|
| 1. | BKB Cempaka          | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 2. | BKB Mawar            | Minimnya kader terlatih, , minimnya dana dari pemerintah.  |
| 3. | BKB Blewah           | Minimnya kader terlatih, jumlah kader tidak berimbang dengan jumlah sasaran, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 4. | BKB Menur            | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 5. | BKB Melati Handayani | Minimnya pendampingan dari petugas, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah, sulitnya pengkaderan (kader senior sudah mulai pensiun) |
| 6. | BKB Qurota A'yun     | Minimnya kader terlatih, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 7. | BKB Sejahtera        | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah, keterbatasan SDM pengelola.  |
| 8. | BKB Mekarsari        | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 9. | BKB Menur            | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari  |

|     |                   |  |
|-----|-------------------|--|
|     |                   | pemerintah.  |
| 10. | BKB Puspa Mekar   | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah, kesulitan mengelola kegiatan karena kader merangkap berbagai kegiatan sekaligus di masyarakat. |
| 11. | BKB Ngudi Rahayu  | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 12. | BKB Cerdas        | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 13. | BKB Amanah        | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 14. | BKB Kasih Ibu     | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 15. | BKB Makanthi      | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 16. | BKB Cerdas        | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 17. | BKB Al Ma'ruf     | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |
| 18. | BKB Baitul Hikmah | Minimnya kader terlatih, kurangnya sarana prasarana, minimnya dana dari pemerintah.  |

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa masalah utama dalam implementasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK ada pada 3 hal utama yaitu :

1. Aspek regulasi dengan belum adanya produk perundangan baik berupa peraturan daerah maupun keputusan bupati yang secara legal formal mengatur implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PSUD, dan SDIDTK ini di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
2. Aspek pendanaan dengan minimnya anggaran dari pemerintah maupun swadaya masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK ini di masyarakat.
3. Aspek kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.

Faktor-faktor atau dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalah tujuan dan sasaran kebijakan, struktur organisasi, sumberdaya baik dana maupun sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, kondisi sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. Berdasar data permasalahan tersebut di atas, nampak bahwa keberhasilan implementasi kebijakan belum optimal. Pada aspek sumber daya, masih banyak kelompok layanan yang belum memiliki sumber daya terlatih, sumber daya penganggaran juga terbatas. Hubungan antar organisasi di tingkat kabupaten dengan kelompok layanan lebih bersifat koordinatif dan pembinaan. Secara legalitas belum semua kelompok layanan memiliki ketetapan hukum sebagai organisasi, belum ada SK dari pemerintah desa maupun instansi terkait.

### **G. Tindakan yang diambil untuk mengatasi Masalah Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK**

Pada dataran kebijakan di level pelaksana di dinas, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. DP3AKBPMD sebagai organisasi perangkat daerah melakukan inovasi pola pelatihan SDM pelaksana; di mana pada satu fase pelatihan dilakukan secara intensif kepada beberapa kelompok saja dengan melibatkan semua kader/pengelola di kelompok yang terpilih. Dengan pola ini diharapkan wawasan dan skills kader akan lebih merata. Di sisi yang lain, dilakukan pola kemitraan dalam implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah melalui dinas juga memotivasi pelaksana di lini lapangan dalam forum musrenbang di desa untuk bisa melakukan advokasi dan komunikasi guna memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah desa melalui alokasi dana desa dalam rangka implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

Adapun di lini kader pelaksana, informan menyatakan bahwa kader berusaha meningkatkan pemahaman secara mandiri dengan forum-forum diskusi di masyarakat. Selain itu di beberapa lokasi (Semanu, Ponjong, Wonosari, Panggang, dan Tepus) juga berusaha menggali dana swadaya dari masyarakat. Komunikasi, informasi, dan edukasi dari Penyuluh KB dan para kader pelaksana kepada masyarakat juga dilakukan sebagai upaya mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

Lebih lanjut penggalian data kepada para Penyuluh Keluarga Berencana sebagai petugas fungsional sumber daya manusia di lini lapangan, menunjukkan tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK meliputi : melakukan strategi pembinaan rutin kepada kelompok kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK; melaksanakan mekanisme operasional untuk koordinasi dan konsolidasi rutin di lini lapangan berupa rapat koordinasi di tingkat kecamatan dan desa, pertemuan kader, dan kunjungan ke kelompok. Para Penyuluh KB juga memfasilitasi pelaksanaan orientasi dan pelatihan kader keterpaduan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa; melakukan upaya pengembangan kelompok kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK agar persebarannya lebih meluas di wilayah kerja; dan kebersamai upaya advokasi dan pendekatan kepada pemerintah desa untuk mengakses alokasi dana desa bagi pelaksanaan kegiatan keterpaduan ini.

Pada dataran operasional teknis ketugasan, Penyuluh KB melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan fungsional penyuluh KB dengan baik, utamanya pada fungsi penyuluhan/KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) serta pelayanan yang terkait implementasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah kerja. Selain itu juga dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah kerja

Berbagai tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK tersebut cukup efektif mengatasi masalah walaupun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara dengan informan 2, dalam jangka pendek yang dirasakan, beberapa tindakan yang dilakukan terutama pada pengelolaan pelatihan kader cukup efektif untuk mengatasi masalah yang ada utamanya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk masalah penganggaran yang terbatas, berbagai tindakan yang dilakukan dirasa belum efektif. Diperlukan kesadaran dan kepedulian berbagai pihak akan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK baik pada dataran regulasi berupa peraturan perundangan tingkat daerah maupun dukungan anggaran.

Adapun berbagai tindakan yang dilakukan oleh petugas fungsional lini lapangan cukup efektif untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan implementasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di lini lapangan. Terbukti layanan keterpaduan ini tetap berlangsung secara rutin di masing-masing kelompok walaupun kurang berkembang dan masih memiliki banyak keterbatasan. Belum ada tindakan nyata yang ditempuh untuk mewujudkan adanya regulasi berupa peraturan daerah atau keputusan bupati tentang layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Tindakan yang ditempuh tidak efektif untuk mengatasi permasalahan aspek regulasi sehingga berdampak pula pada belum teratasinya masalah dukungan anggaran dari pemerintah.

## BAB V

### PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengacu pada peta dan kondisi implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum optimal dilaksanakan. Lokasi pelaksanaan sudah merata di semua wilayah kecamatan tetapi persebarannya masih belum mencakup seluruh wilayah desa. Terdapat 18 lokasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 18 desa, sekitar 12,5% dari total 144 desa yang ada. Kondisi pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK juga belum optimal, di mana model utama keterpaduan dilaksanakan di waktu dan tempat yang sama belum dilakukan oleh semua kelompok. Kondisi pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK berbeda-beda di masing-masing lokasi. Secara umum terdapat tiga pola keterpaduan :
  - a). BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan terpadu di waktu dan tempat yang sama. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan.
  - b). BKB dan PAUD dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat yang sama sedang SDIDTK dilaksanakan terpisah di Posyandu pada waktu dan tempat yang berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan

c). BKB dan SDIDTK dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat yang sama sedang PAUD dilaksanakan terpisah pada waktu dan tempat yang berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan

Standar operasional pelaksanaan kegiatan yang ideal adalah kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama. Dari data hasil penelitian diperoleh bahwa pola ideal baru dilakukan di 10 kelompok dari 18 kelompok layanan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pada dataran pelaksanaan program dan kegiatan di lini lapangan, kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum terlaksana secara optimal.

2. Berdasar pada aspek organisasi, interpretasi dan pelaksanaan, implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul sudah terlaksana dengan cukup baik. Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas tentang jabatan, tupoksi dan merupakan kerangka pedoman kerja bagi pegawai/pelaksana guna mengimplementasikan kebijakan sesuai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK diampu oleh bidang pengendalian penduduk dan KB terutama pada seksi Keluarga Berencana dan pada pelaksanaan di lini lapangan berkoordinasi dengan rumpun jabatan

fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Pada aspek organisasi, struktur organisasi sudah tertata berikut tugas dan fungsinya. Adapun pada sisi sumber daya manusia, dukungannya belum optimal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Jumlah sumber daya manusia yang berada di pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK masih terbatas. Jumlah PNS PKB terbatas, di mana 1 PKB bisa mengampu 1-3 desa. Selain itu sumber daya kader yang telah mendapatkan pelatihan juga terbatas. Pada aspek regulasi, implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum didukung oleh peraturan yang jelas di tingkat kabupaten. Belum ada Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati yang mengatur implementasi kebijakan ini di lini lapangan. Pada lini kelompok pelaksana layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK, hampir semua kelompok memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Semua kelompok telah memiliki perlengkapan kegiatan yang diperlukan berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif.

3. Berdasarkan hasil penelitian, masalah utama dalam implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul adalah :
- a) Aspek regulasi, dengan belum adanya produk perundangan baik berupa peraturan daerah maupun keputusan bupati yang secara legal formal mengatur implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PSUD, dan SDIDTK ini di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
  - b) Aspek pendanaan dan dukungan anggaran, dengan minimnya anggaran dari pemerintah maupun swadaya masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK ini di masyarakat.
  - c) Aspek sumber daya manusia, berupa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PSUD, dan SDIDTK ini di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang belum memadai.
  - d) Lemahnya koordinasi dan konsolidasi lintas sektor yang terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul; di mana dalam dataran teknis kebijakan ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah DP3AKBPMD, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, dan TP PKK.
4. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- a) Pemegang kebijakan : melakukan inovasi pola pelatihan SDM pelaksana, melakukan kemitraan dalam implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, memotivasi pelaksana di lini lapangan dalam forum musrenbang di desa untuk bisa melakukan advokasi dan komunikasi guna memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah desa melalui alokasi dana desa.
- b) Kader pelaksana : berusaha meningkatkan pemahaman secara mandiri dengan forum-forum diskusi di masyarakat, berusaha menggali dana swadaya dari masyarakat.
- c) Petugas fungsional di lini lapangan : melakukan strategi pembinaan rutin kepada kelompok kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK; melaksanakan mekanisme operasional untuk koordinasi dan konsolidasi rutin di lini lapangan berupa rapat koordinasi di tingkat kecamatan dan desa, pertemuan kader, dan kunjungan ke kelompok; memfasilitasi pelaksanaan orientasi dan pelatihan kader keterpaduan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa; melakukan upaya pengembangan kelompok kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK agar persebarannya lebih meluas di wilayah kerja; membersamai upaya advokasi dan pendekatan kepada pemerintah desa untuk mengakses alokasi dana desa bagi pelaksanaan kegiatan keterpaduan ini; melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan fungsional penyuluh KB dengan baik, utamanya pada fungsi penyuluhan/KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) serta

pelayanan yang terkait implementasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah kerja; melakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah kerja

5. Berbagai tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK tersebut cukup efektif mengatasi masalah walaupun belum sepenuhnya optimal. Pengelolaan pelatihan kader cukup efektif untuk mengatasi masalah yang ada utamanya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk masalah penganggaran yang terbatas, berbagai tindakan yang dilakukan belum efektif mengatasi masalah. Adapun berbagai tindakan yang dilakukan oleh petugas fungsional lini lapangan cukup efektif untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan implementasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di lini lapangan. Tindakan yang ditempuh tidak efektif untuk mengatasi permasalahan aspek regulasi sehingga berdampak pula pada belum teratasinya masalah dukungan anggaran dari pemerintah.

#### **b. Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi secara teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait ilmu kebijakan publik. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu terkait pendidikan dan pengembangan anak usia dini secara terpadu. Pada hasil penelitian

ini dapat diketahui bahwa secara teoritis, penelitian ini secara keseluruhan mendukung beberapa teori yang telah disampaikan pada bagian awal penelitian.

Hal penting yang berhubungan dengan implikasi teoritis penelitian ini dapat dijabarkan adalah bahwa suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan. DP3AKBPMD sebagai pelaksana kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Anderson (2014) bahwa: “Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan“. Dalam hal ini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh *implementing agency*, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DP3AKBPMD sebagai bagian dari birokrasi pemerintah daerah).

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor-faktor atau dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalah tujuan dan sasaran kebijakan, struktur organisasi, sumberdaya baik dana maupun sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, kondisi sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor.

Dalam penelitian ini juga terdapat teori yang disampaikan oleh Jones (1994) tentang tiga pilar penilaian implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi, dan pelaksanaan.

### **c. Implikasi Kebijakan**

1. Untuk menguatkan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul, pemerintah daerah perlu menginisiasi produk peraturan daerah untuk diajukan ke legislatif sehingga kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan lebih masif mengingat kebermanfaatannya di masyarakat. Produk peraturan daerah ini diharapkan akan mempengaruhi kebijakan penganggaran dan penetapan prioritas program pembangunan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.
2. Sinergisitas berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun sektor ketiga bisa dikuatkan guna mengatasi permasalahan yang ada terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

### **d. Keterbatasan dan Hambatan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan diantaranya :

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan jangkauan wilayah penelitian di mana dalam penelitian ini terfokus di DP3AKBPMD dan perangkat pelaksana di bawahnya.

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan juga dalam eksplorasi lebih lanjut hambatan dalam penetapan regulasi tentang Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggalian dan analisa data-data kuantitatif yang terakses.

#### **e. Saran**

1. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas, perlu dilakukan penelitian sejenis dengan lokasi penelitian lintas sektor di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang secara teknis memiliki tugas dalam pelaksanaan program SDIDTK dan PAUD.
2. Diperlukan penelitian lain untuk mendalami hambatan dalam penetapan regulasi tingkat pemerintah daerah terkait kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK. Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama, diharapkan melakukan penelitian lebih mendalam terkait hal ini.
3. Bagi peneliti lain yang tertarik dengan tema yang sama bisa melakukan penelitian dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan data dan analisis berbasis kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James E. (2014). *Public Policymaking*. New York : Cengage Learning
- BKKBN. (2006). *Bina Keluarga Balita*. Jakarta : BKKBN
- BKKBN. (2011). *Panduan Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga (BKB) Yang Terintegrasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif*. Jakarta : BKKBN
- BKKBN. (2015). *Menjadi Orangtua Hebat*. Jakarta: BKKBN
- BPMPKB. (2015). *Program Layanan Keterpaduan BKB, PAUD SDIDTK Kabupaten Gunungkidul*. Makalah tidak diterbitkan
- Creswell, John W. (2016). *Research Design Pendekatan, Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dinkes RI. (2012). *Panduan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang*. Jakarta : Dinkes RI
- Dinkes Gunungkidul. (2014). *Profil Dinas Kesehatan 2014*. Wonosari: Dinkes Gunungkidul
- Direktorat Pendidikan Anak usia Dini. (2008). *Konsep Dasar dan Filosofi Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta : makalah tidak diterbitkan
- Dye, Thomas R. (1975). *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,Teori dan Isu*. Jakarta: Gaya Media
- Kemenkes. (2010). *Pedoman Pelaksanaan SDIDTK di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta:Kemenkes
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media

- Lester, James P dan Stewart Jr, Joseph. (2000). *Public Policy : An Evolutionary Approach*. USA : Wadsworth Thomson Learning
- Maritalia, Dewi. (2009). Analisis Pelaksanaan Program SDIDTK Balita dan Anak Prasekolah di Puskesmas Kota Semarang Tahun 2009. Tesis: Tidak diterbitkan
- Maxim and George W. (1993). *The Very Young : Guidening Children from Infant Through the Early Years*. New York : Publication Services Inc
- Morrison and George. (1988). *Early Childhood Education 4<sup>th</sup> Edition*. New York : Columbus-Merrill Publishing Co.
- Rahma, Merita. (2016). Analisis Terhadap Implementasi Program KB. Jakarta : artikel tidak diterbitkan
- Ripley, Randall B and Grace A. Franklin. (1982). *Bureaucracy and Policy Implementation*. Illinois : The Dorsey Press.
- Spodek, Benard et al. (1991). *Foundation of Early Childhood Education*. New York : Allyn and Bacon
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Komparatif*. Yogyakarta: CAPS

## **PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN**

Wawancara ini merupakan cara untuk menggali informasi mengenai pendapat informan yang berkaitan dengan judul penelitian *“Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul”*.

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/Ibu di tempat kerja karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan akademis. Untuk itu kami mengharap informasi serta jawaban yang sesungguhnya dari Bapak/Ibu sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai hal yang kami tanyakan.

Atas bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih.

| IDENTITAS INFORMAN     |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama                | : |
| 2. Umur                | : |
| 3. Jenis Kelamin       | : |
| 4. Status Perkawinan   | : |
| 5. Pendidikan terakhir | : |
| 6. Jabatan             | : |
| 7. Instansi/lembaga    | : |

## DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

### A. Kepala Bidang dan Kepala Seksi

1. Apakah menurut Anda organisasi yang ada di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?
2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
4. Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
7. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?
8. Sejauhmana efektivitas tindakan tersebut untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

## B. Penyuluh Keluarga Berencana

1. Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, apakah menurut Anda sistem organisasi yang ada di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?
2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?
6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?
7. Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah yang ada?
8. Bagaimana peran Anda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang ada?
9. Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang kebijakan terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

### C. Kader pelaksana

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?
2. Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?
3. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
4. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?
5. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?
6. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
7. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?
8. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?
9. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?

## **PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN**

Wawancara ini merupakan cara untuk menggali informasi mengenai pendapat informan yang berkaitan dengan judul penelitian "*Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul*".

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/Ibu di tempat kerja karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan akademis. Untuk itu kami berharap informasi serta jawaban yang sesungguhnya dari Bapak/Ibu sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai hal yang kami tanyakan.

Atas bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih.

| IDENTITAS INFORMAN     |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama                | : |
| 2. Umur                | : |
| 3. Jenis Kelamin       | : |
| 4. Status Perkawinan   | : |
| 5. Pendidikan terakhir | : |
| 6. Jabatan             | : |
| 7. Instansi/lembaga    | : |

## DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

### A. Kepala Bidang dan Kepala Seksi

1. Apakah menurut Anda organisasi yang ada di DP3AKBPMMD telah terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?
2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
4. Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
7. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?
8. Sejuahmana efektivitas tindakan tersebut untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

## B. Penyuluh Keluarga Berencana

1. Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, apakah menurut Anda sistem organisasi yang ada di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?
2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?
6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?
7. Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah yang ada?
8. Bagaimana peran Anda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang ada?
9. Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang kebijakan terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

### C. Kader pelaksana

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?
2. Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?
3. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
4. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?
5. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?
6. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
7. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?
8. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?
9. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?

## PANDUAN OBSERVASI

Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara, maka dalam penelitian ini juga dilakukan metode pengumpulan data melalui observasi. Observasi ini dilaksanakan pada pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD dan SDIDTK di kelompok. Melalui observasi terhadap kegiatan ini, diharapkan akan diperoleh informasi dan gambaran mengenai implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD dan SDIDTK.



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN  | JAWABAN   | KETERANGAN |
|----|---|---|------------|
| 1. | Apakah menurut Anda organisasi yang ada di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?  | Secara struktur organisasi sudah ada dan sudah ditetapkan melalui keputusan Bupati. Tetapi perubahan kelembagaan yang ada belum sepenuhnya optimal melaksanakan tugas dan fungsi. | Informan 1 |
| 2. | Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Di lini lapangan jumlah PLKB masih kurang jika dibandingkan dengan wilayah yang diampu. Masih ada PKB/PLKB yang mengampu 2-3 desa.  | Informan 1 |
| 3. | Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?                                 | Belum ada, kita masih mengacuke Peraturan Gubernur. Kalau di kabupaten peraturan bupati belum punya.  | Informan 1 |
| 4. | Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?                                     | Kita turunkan dari juknis BKKBN   | Informan 1 |

|    |   |  |            |
|----|---|--|------------|
| 5. | Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?   | 1 di setiap kecamatan, itu minimalnya. Pengembangan dimungkinkan untuk desa-desa yang siap.  | Informan 1 |
| 6. | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?  | Klise...pendanaan masih menjadi masalah yang menghambat program.   | Informan 1 |
| 7. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?   | Yaah...tetap dilaksanakan program seoptimal mungkin dengan kerjasama lintas sector, dengan Dinkes, Dikpora, TP PKK. Cuma advokasi ke pemerintah desa yang punya ADD. | Informan 1 |
| 8. | Sejauh mana efektivitas tindakan tersebut untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Di beberapa desa dan kecamatan bisa...tapi belum meluas.   | Informan 1 |

### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN  | JAWABAN  | KETERANGAN |
|----|---|--|------------|
| 1. | Apakah menurut Anda organisasi yang ada di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?  | Sudah ada ketetapanannya...tahun ini ada perubahan kelembagaan OPD. Tugas dan fungsi juga jelas. | Informan 2 |
| 2. | Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Sebagaimana yang diketahui SDM kita terbatas. Ada 3 seksi dengan jumlah staf yang terbatas.      | Informan 2 |
| 3. | Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?                                 | Belum ada itu. Gunungkidul masih tertinggal dibanding Kulonprogo.                                | Informan 2 |
| 4. | Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?                                     | Prosedur kita lakukan sesuai ketentuan yang didapat dari perwakilan BKKBN.                       | Informan 2 |

|    |   |  |            |
|----|---|--|------------|
| 5. | Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?   | Saat ini ada tiap-tiap kecamatan ada kelompok percontohan.   | Informan 2 |
| 6. | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?  | Masalah utama kalau kebijakanya di regulasi. Kita belum punya perda-nya.   | Informan 2 |
| 7. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?   | Kalau di seksisaya, pelatihan dimodifikasi. Untuk kader BKB tidak lagi 1-2 utusan kelompok tapi semua kader dikirim sehingga bisa saling sharing saat pelaksanaan di kelompok. Memang akhirnya bertahap, tidak semua kecamatan bisa terdani untuk pelatihan ini. | Informan 2 |
| 8. | Sejauh mana efektivitas tindakan tersebut untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Belum terukur itu...   | Informan 2 |

### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA FGD

| NO | PERTANYAAN  | JAWABAN  | KETERANGAN                         |
|----|---|--|------------------------------------|
| 1. | Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, apakah menurut Anda sistem organisasi yang ada di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?        | Dari sisi organisasi, struktur organisasi sudah tertata berikut tugas dan fungsinya.   | Kelompok 1<br>(Informan 3,4,5,6,7) |
| 2. | Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Pelaksanaan layanan keterpaduan dilaksanakan oleh para kader yang sebagian besar belum terlatih. Belum optimal.  | Kelompok 1<br>(Informan 3,4,5,6,7) |
| 3. | Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?                                 | Aspek regulasi, implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum didukung oleh peraturan yang jelas di tingkat kabupaten.                                | Kelompok 1<br>(Informan 3,4,5,6,7) |
| 4. | Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?   | Pembinaan rutin ke kelompok kegiatan. Sesuai mekanisme operasional ada kegiatan rakor desa, pertemuan kader, dan kunjungan ke kelompok. Memfasilitasi kegiatan pelatihan juga. | Kelompok 1<br>(Informan 3,4,5,6,7) |
| 5. | Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?  | Tiap kecamatan ada 1 kelompok semacam percontohan, dikembangkan secara bertahap ke desa-desa lainnya.  | Kelompok 1<br>(Informan 3,4,5,6,7) |
| 6. | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan  | Yang jelas keterbatasan dana, alokasi dana   | Kelompok 1                         |

|    |   |  |                                    |
|----|---|--|------------------------------------|
|    | kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?  | masih minim, sarana prasarana juga terbatas.   | (Informan 3,4,5,6,7)               |
| 7. | Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah yang ada?  | Pendekatan ke pemerintah desa untuk akses dana ADD bagi kegiatan keterpaduan ini. Kegiatan ini penting dan dibutuhkan masyarakat sehingga perlu lintas sektor berkoordinasi penguatan pendanaan. Bisa diawali dengan penguatan regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan bupati. | Kelompok 1<br>(Informan 3,4,5,6,7) |
| 8. | Bagaimana peran Anda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang ada?  | Melaksanakan tupoksi dengan baik.  | Kelompok 1<br>(Informan 3,4,5,6,7) |
| 9. | Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang kebijakan terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Membuat regulasi yang jelas dan mengikat, menguatkan pendanaan, program peningkatan kapasitas SDM pelaksana terus ditingkatkan.  | Kelompok 1<br>(Informan 3,4,5,6,7) |

### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN  | JAWABAN  | KETERANGAN                              |
|----|---|--|---|
| 1. | Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, apakah menurut Anda sistem organisasi yang ada di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?        | Sudah ada aturan tentang organisasi perangkat daerah dan posisi jabatan fungsional. Sistem sudah baik, tupoksi juga terlaksana.  | Kelompok 2<br>(informan 8, 27,28,29,30) |
| 2. | Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Sebetulnya diperlukan kader yang memiliki pemahaman tentang perkembangan anak usia dini secara holistik integrative serta pengetahuan tentang pengelolaan layanan keterpaduan ini. Naah ini yang kita belum oke. | Kelompok 2<br>(informan 8, 27,28,29,30) |
| 3. | Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?                                 | Belum ada Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati yang mengatur implementasi kebijakan ini di lini lapangan.  | Kelompok 2<br>(informan 8, 27,28,29,30) |
| 4. | Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?   | Melakukan penyuluhan, KIE ( <i>komunikasi, informasi, edukasi</i> ), pembinaan kelompok kegiatan, monitoring kegiatan di wilayah kerja.  | Kelompok 2<br>(informan 8, 27,28,29,30) |
| 5. | Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?  | Belum tersebar ke semua desa di wilayah kerja, masih percontohan tingkat kecamatan   | Kelompok 2<br>(informan 8, 27,28,29,30) |
| 6. | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan   | Klise...masalah dana, minim anggaran itu yang utama karena program bagus tanpa   | Kelompok 2<br>(informan 8,              |

|    |   |   |                                      |
|----|---|---|--------------------------------------|
|    | SDIDTK di wilayah Anda?   | dukungan anggaran yang memadai tetap hasil kurang baik, pelaksanaannya banyak hambatan.   | 27,28,29,30)                         |
| 7. | Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah yang ada?  | Ada peraturan yang kuat dan mengikat. Trus kerjasama lintas sektor itu penting.   | Kelompok 2 (informan 8, 27,28,29,30) |
| 8. | Bagaimana peran Anda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang ada?  | Peran yaa sesuai ketugasan. Pembinaan rutin kita lakukan bersama teman-teman.   | Kelompok 2 (informan 8, 27,28,29,30) |
| 9. | Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang kebijakan terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD. dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Menetapkan dukungan anggaran yang memadai dan koordinasi lintas sektor. Termasuk saat musren, membuat kebijakan missal dana desa bisa terakses untuk pelaksanaan kebijakan ini. | Kelompok 2 (informan 8, 27,28,29,30) |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN  | JAWABAN  | KETERANGAN                        |
|----|---|--|-----------------------------------|
| 1. | Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, apakah menurut Anda sistem organisasi yang ada di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?        | Kalau bicara sistem sudah baik. Pelaksanaannya pada tugas dan fungsi juga sudah baik.  | Kelompok 3 (informan 31,31,33,34) |
| 2. | Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Kalau pada sisi SDM, dukungannya belum optimal baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Jumlah penyuluh KB belum sesuai dengan jumlah desa, masih kurang. Kader di kelompok juga rata-rata berbekal semangat dan mengabdikan, belum semua punya bekal yang memadai. | Kelompok 3 (informan 31,31,33,34) |
| 3. | Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?                                 | Belum ada Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati yang mengatur implementasi kebijakan ini di lini lapangan.  | Kelompok 3 (informan 31,31,33,34) |
| 4. | Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?   | Membersamai kelompok dalam melaksanakan kebijakan layanan keterpaduan ini. Periodik kita lakukan kunjungan ke kelompok. Yaa...kegiatan pembinaan, rakor, fasilitasi kegiatan.  | Kelompok 3 (informan 31,31,33,34) |
| 5. | Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD,  | Belum ada penyebaran...masih upaya membangkitkan dari kondisi hidup segan  | Kelompok 3 (informan              |

|    |   |   |                                   |
|----|---|---|-----------------------------------|
|    | dan SDIDTK di wilayah Anda?   | mati tak mau. Karena kebijakan ini baik dan penting tapi masih banyak hambatan pada pelaksanaannya.                                   | 31,31,33,34)                      |
| 6. | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?   | Kompetensi kader, kualitas SDM lah menyangkut wawasan dan pemahaman. Juga tentunya dukungan anggaran yang minim.                      | Kelompok 3 (informan 31,31,33,34) |
| 7. | Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah yang ada?  | Ya itu...kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM kader bisa ditingkatkan. Trus dukungan anggaran dari pemerintah bisa dikuatkan. | Kelompok 3 (informan 31,31,33,34) |
| 8. | Bagaimana peran Anda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang ada?  | Sejauh ini terus berupaya menguatkan peran sesuai ketugasan dengan segala keterbatasan yang ada                                       | Kelompok 3 (informan 31,31,33,34) |
| 9. | Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang kebijakan terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Membuat peraturan yang tegas terkait kebijakan ini.   | Kelompok 3 (informan 31,31,33,34) |

### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA PKB

| NO | PERTANYAAN  | JAWABAN  | KETERANGAN                        |
|----|---|--|-----------------------------------|
| 1. | Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, apakah menurut Anda sistem organisasi yang ada di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?        | Sudah baik kok untuk optimalnya ya sudah berproses. Tapi sistem sudah jelas dan terstruktur. Peraturan kelembagaan dan tupoksi semua ada.  | Kelompok 4 (informan 35,36,37,38) |
| 2. | Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Kalau pada sisi SDM, dukungannya belum optimal. Jumlah penyuluh KB belum sesuai dengan jumlah desa, masih kurang. 1 PKB bisa mengampu 1-3 desa, bisa dibayangkan. Kader di kelompok juga terbatas. Pada belum dilatih semua. | Kelompok 4 (informan 35,36,37,38) |
| 3. | Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?                                 | Belum ada Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati yang mengatur implementasi kebijakan ini di lini lapangan.  | Kelompok 4 (informan 35,36,37,38) |
| 4. | Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?   | Pembinaan rutin ke kelompok kegiatan. Sesuai mekanisme operasional ada kegiatan rakor desa, pertemuan kader, dan kunjungan ke kelompok. Memfasilitasi kegiatan dan mengadakan atau mengirim kader ke pelatihan/orientasi.    | Kelompok 4 (informan 35,36,37,38) |
| 5. | Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?  | Tiap kecamatan ada 1 kelompok semacam percontohan, dikembangkan secara bertahap ke desa-desa lainnya.  | Kelompok 4 (informan 35,36,37,38) |

|    |   |   |                                   |
|----|---|---|-----------------------------------|
| 6. | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?   | Keterbatasan dana dan anggaran, jadi alokasi dana masih minim, sarana prasarana juga terbatas. Kuantitas dan kualitas SDM kader juga terbatas.  | Kelompok 4 (informan 35,36,37,38) |
| 7. | Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah yang ada?  | Advokasi ke pemerintah desa untuk akses dana ADD bagi kegiatan keterpaduan ini. Penting juga penguatan regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan bupati.  | Kelompok 4 (informan 35,36,37,38) |
| 8. | Bagaimana peran Anda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang ada?  | Melaksanakan tupoksi dengan baik.   | Kelompok 4 (informan 35,36,37,38) |
| 9. | Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang kebijakan terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? | Membuat regulasi yang jelas dan mengikat, menguatkan pendanaan, program peningkatan kapasitas SDM pelaksana terus ditingkatkan, pelatihan-pelatihan dan tentunya monitoring evaluasi kegiatan di lini lapangan. | Kelompok 4 (informan 35,36,37,38) |

### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 11 di balai dusun.                                 | Informan 9 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Iya...dilaksanakan bareng...PAUD dulu terus SDIDTK dan BKB. Pagi sampai siang sesuai jadwal.          | Informan 9 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya semua 12 ada yang dari BKB dibantu guru PAUD juga dan kader Posyandu.                        | Informan 9 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | 3 orang yang sudah, yang lain belum   | Informan 9 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum ada. Kami kembangkan sendiri sesuai arahan petugas.   | Informan 9 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Dukungan dana terbatas. Fasilitas juga terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas. | Informan 9 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan   | Belum optimal. Kadang kalau musim sibuk yaa tidak terlaksana. Kegiatan kadang                         | Informan 9 |

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
|     | layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?   | bentrok juga di masyarakat.  |            |
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB, puskesmas, dinas. Tapi tetap terkendala dana.  | Informan 9 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minima, kader belum terlatih.  | Informan 9 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Kurang paham Bu..kemarin di musrenbang usulan untuk honor kader KB sudah disetujui tapi klo kegiatan keterpaduan ini memang belum ada di ADD | Informan 9 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan 1-2 kali setiap tanggal 15 dan tanggal 9. Pelaksanaan di balai dusun.                            | Informan 10 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | PAUD dan BKB bareng...kalau Posyandu beda jadwal.   | Informan 10 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya ada 12   | Informan 10 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...   | Informan 10 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...sesuai penjelasan PKB   | Informan 10 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dana terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas. | Informan 10 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal.  | Informan 10 |

|     |  |  |             |
|-----|--|--|-------------|
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB dan dinas kurang banyak...dukungan dana yang minim. | Informan 10 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Dana minim, kader belum terlatih.                                      | Informan 10 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Wedew nopo njih Bu...kalau kayak saya mboten ngertos.                  | Informan 10 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN  | KETERANGAN  |
|----|--|--|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 10. Pelaksanaan di balai dusun.   | Informan 11 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Posyandu bareng BKB. PAUD nya misah di hari lain.  | Informan 11 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru PAUD juga dan kader Posyandu semua ada 9.   | Informan 11 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan  | Informan 11 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat diklat atau penjelasan PKB   | Informan 11 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dan terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas.         | Informan 11 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal. Sak mampunya..kadang juga susah membagi jadwal dengan kegiatan lain. Namanya di desa kan musti bergaul dengan | Informan 11 |

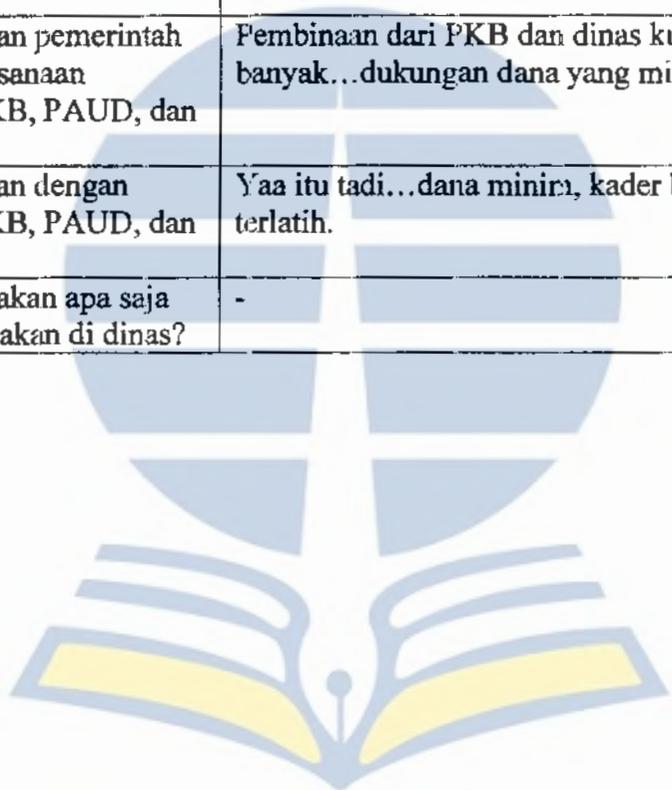
|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
|     |  | masyarakat.   |             |
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas KB...dukungan dana yang minim. | Informan 11 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih.                      | Informan 11 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Kurang paham Bu...tapi pernah diundang pelatihan.                     | Informan 11 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.                                    | Informan 12 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Yang bareng hanya SDIDTK dan BKB, ngikut jadwal Posyandu tanggal 15 yang PAUD hari dan tempat beda.                   | Informan 12 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya ada sekitar 10 orang   | Informan 12 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...   | Informan 12 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...sesuai penjelasan PKB   | Informan 12 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dana terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas. | Informan 12 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan   | Belum optimal. Sak mampunya..sak saged-saged.   | Informan 12 |

|     |  |  |             |
|-----|--|--|-------------|
|     | layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?   |  |             |
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB dan dinas kurang banyak...dukungan dana yang minim. | Informan 12 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih.                       | Informan 12 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | -  | Informan 12 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN  | KETERANGAN  |
|----|--|--|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 13. Pelaksanaan di balai dusun.                                       | Informan 13 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Iya...dilaksanakan bareng...PAUD dulu terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam 11-an. | Informan 13 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru PAUD juga dan kader Posyandu semua ada 9.                                     | Informan 13 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan  | Informan 13 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat diklat atau penjelasan PKB   | Informan 13 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dan terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas.     | Informan 13 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah  | Belum optimal. Sak mampunya..kadang juga   | Informan 13 |

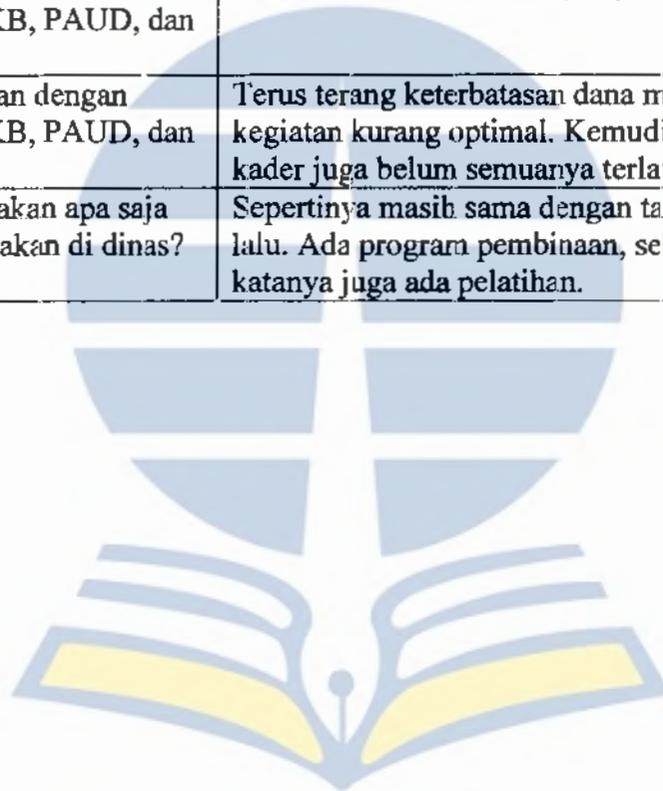
|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
|     | optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?  | susah membagi jadwal dengan kegiatan lain. Namanya di desa kan musti bergaul dengan masyarakat. |             |
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas KB...dukungan dana yang minim.                           | Informan 13 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih.  | Informan 13 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Kurang paham Bu...tapi pernah diundang pelatihan.   | Informan 13 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.  | Informan 14 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Iya...dilaksanakan bareng...  | Informan 14 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya ada 9.   | Informan 14 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...baru 4 orang apa yaa...eh 5 orang.   | Informan 14 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Masih mengacu ke modul pelatihan, kalau yang resmi begitu belum punya.  | Informan 14 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dana terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas.                 | Informan 14 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal. Belum terlatih dan hangabehi...jadi kader keterpaduan juga aktifis kegiatan lainnya, tidak ada yang betul-betul fokus. | Informan 14 |

|     |  |  |             |
|-----|--|--|-------------|
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB dan dinas kurang banyak... dukungan dana yang minim.  | Informan 14 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Terus terang keterbatasan dana membuat kegiatan kurang optimal. Kemudian SDM kader juga belum semuanya terlatih. | Informan 14 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Sepertinya masih sama dengan tahun-tahun lalu. Ada program pembinaan, sebentar lagi katanya juga ada pelatihan.  | Informan 14 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN  | KETERANGAN  |
|----|--|--|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 13. Pelaksanaan di balai dusun juga lokasi posyandu.                              | Informan 15 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Tidak. BKB dan SDIDTK bareng...kalau PAUD nya pisah lokasi di gedung PAUD.   | Informan 15 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru PAUD juga dan kader Posyandu semua ada 12.  | Informan 15 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan  | Informan 15 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat diklat atau penjelasan PKB   | Informan 15 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dan terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas.         | Informan 15 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal. Sak mampunya..kadang juga susah membagi jadwal dengan kegiatan lain. Namanya di desa kan musti bergaul dengan | Informan 15 |

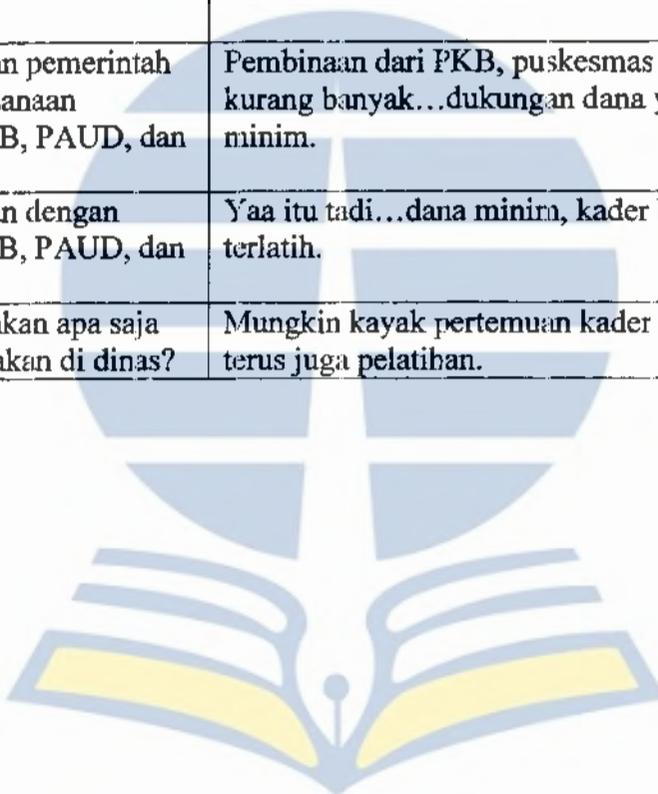
|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
|     |  | masyarakat.   |             |
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas KB...dukungan dana yang minim. | Informan 15 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih.                      | Informan 15 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Kurang paham Bu...tapi pernah diundang pelatihan.                     | Informan 15 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 15 kadang 2 kali. Pelaksanaan di balai dusun.  | Informan 16 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Iya...dilaksanakan bareng, tiga kegiatan di waktu dan tempat yang sama. Kadang yaa ramai...uyuk-uyukan kurang tertata apalagi pas kadernya tidak komplit. | Informan 16 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya ada 12 totalnya.   | Informan 16 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...baru sebagian  | Informan 16 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...sesuai penjelasan PKB dan yang diperoleh di pelatihan   | Informan 16 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dana terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas.                                     | Informan 16 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah  | Belum optimal. Sak mampunya..   | Informan 16 |

|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
|     | optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?  |   |             |
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB, puskesmas dan dinas kurang banyak...dukungan dana yang minim. | Informan 16 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih.                                  | Informan 16 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Mungkin kayak pertemuan kader dilakukan terus juga pelatihan.                     | Informan 16 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN  | KETERANGAN  |
|----|--|--|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 13. Pelaksanaan di balai dusun.                                       | Informan 17 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Iya...dilaksanakan bareng...PAUD dulu terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam 11-an. | Informan 17 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru PAUD juga dan kader Posyandu semua ada 9.                                     | Informan 17 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan  | Informan 17 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat diklat atau penjelasan PKB   | Informan 17 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dan terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas.     | Informan 17 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah  | Belum optimal. Sak mampunya..kadang juga   | Informan 17 |

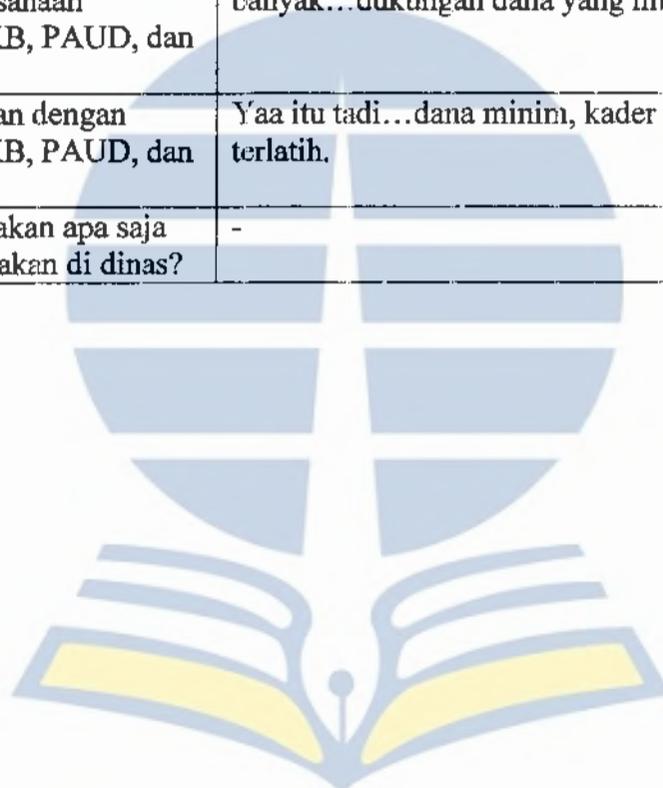
|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
|     | optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?  | susah membagi jadwal dengan kegiatan lain. Namanya di desa kan musti bergaul dengan masyarakat. |             |
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas KB...dukungan dana yang minim.                           | Informan 17 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih.  | Informan 17 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pernegang kebijakan di dinas?   | Kurang paham Bu...tapi pernah diundang pelatihan.   | Informan 17 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.                                    | Informan 18 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Iya...dilaksanakan bareng...  | Informan 18 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya ada 5  | Informan 18 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...   | Informan 18 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...sesuai penjelasan PKB   | Informan 18 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dana terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas. | Informan 18 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal. Sak mampunya..   | Informan 18 |

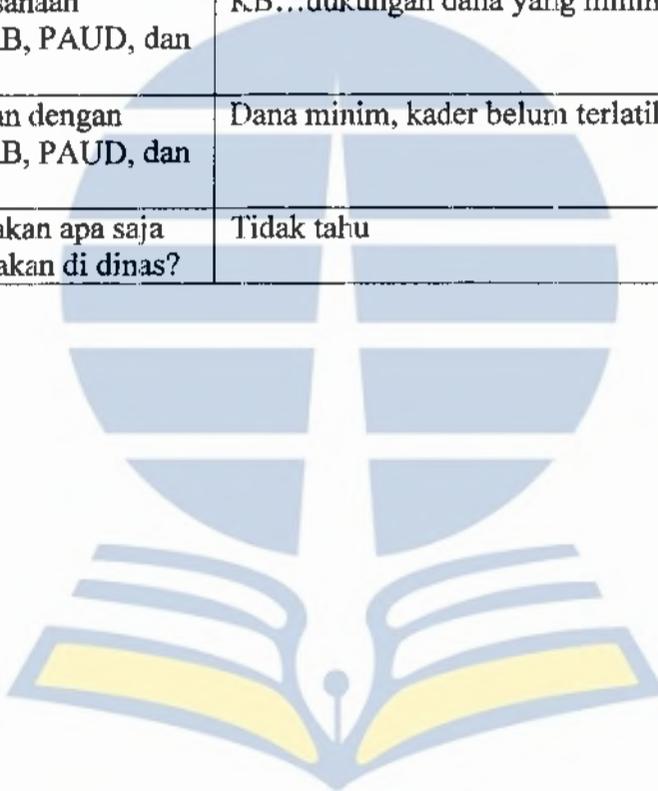
|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB dan dinas kurang banyak... dukungan dana yang minim. | Informan 18 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi... dana minim, kader belum terlatih.                       | Informan 18 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | -   | Informan 18 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN  | KETERANGAN  |
|----|--|--|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.                                   | Informan 19 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | PAUD dulu di lokasi PAUD terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga kegiatan tapi tempatnya beda.                             | Informan 19 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya ada 2   | Informan 19 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan. Tahun ini semoga ada.   | Informan 19 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat diklat atau pembinaan PKB  | Informan 19 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dan terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas. | Informan 19 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal, seperti yang lain. Sak mampunya..kadang juga susah membagi jadwal dengan kegiatan lain..              | Informan 19 |

|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas KB...dukungan dana yang minim. | Informan 19 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Dana minim, kader belum terlatih.                                     | Informan 19 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Tidak tahu  | Informan 19 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 15 posyandu tanggal 18. Pelaksanaan di balai dusun.                | Informan 20 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Yang bareng PAUD sama BKB di balai dusun. Posyandu siang tidak bareng.  | Informan 20 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya ada 5 di Posyandu. PAUD dan BKB 8 orang  | Informan 20 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...   | Informan 20 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum..sesuai pemahaman kami  | Informan 20 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dana terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas. | Informan 20 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal.  | Informan 20 |

|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
|     |  |   |             |
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB dan dinas tapi kurang banyak...dukungan dana sama kayak yang lain masih minim. | Informan 20 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih.  | Informan 20 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Waaah apa ya Bu...pelatihan dan pembinaan bulanan.  | Informan 20 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Ya...selama ini pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilakukan oleh para kader. Kegiatan dilaksanakan sebulan sekali. Di kelompok kami ada 10 kader, yang terlatih baru 2 orang. Modalnya semangat dan kesungguhan mengabdikan ke masyarakat | Informan 21 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Iya...dilaksanakan bareng...PAUD dulu terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam 12.   | Informan 21 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya yang inti ada 10 ngampu semuanya.  | Informan 21 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan   | Informan 21 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat diklat atau penjelasan PKB. Sudah ada BKB kit. Berusaha ikut panduan dan petunjuk yang ada.   | Informan 21 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal.  | Informan 21 |

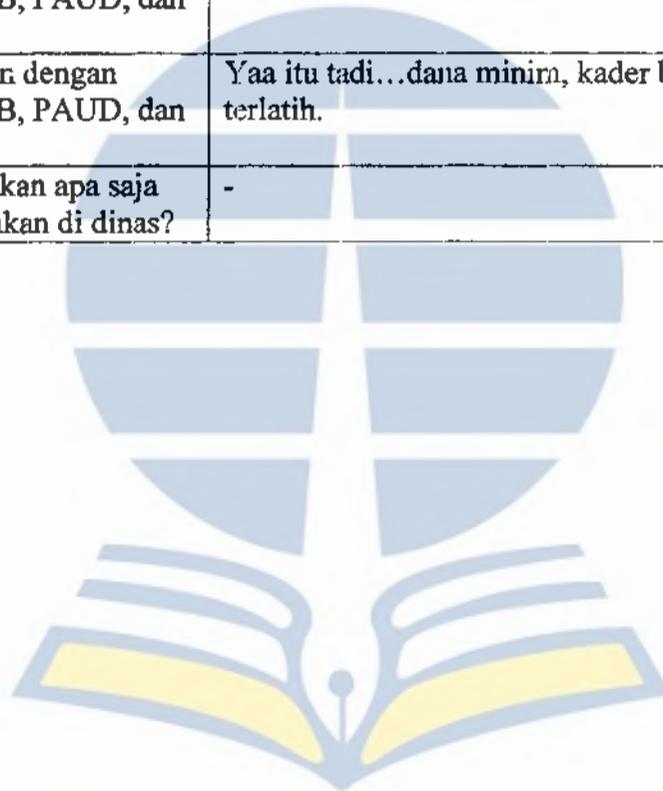
|     |  |  |             |
|-----|--|--|-------------|
|     | dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?  | Dukungan dan terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas.  |             |
| 7.  | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                    | Belum optimal. Sak mempunya..kadang juga susah membagi jadwal dengan kegiatan lain. Namanya di desa kan musti bergaul dengan masyarakat. | Informan 21 |
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas KB...dukungan dana yang minim.  | Informan 21 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih.   | Informan 21 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pernegang kebijakan di dinas?   | Kurang paham Bu...tapi pernah diundang pelatihan.  | Informan 21 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.                                    | Informan 22 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Iya...dilaksanakan bareng...  | Informan 22 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya ada 5  | Informan 22 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...   | Informan 22 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum..sesuai penjelasan PKB  | Informan 22 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dana terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas. | Informan 22 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal. Sak mampunya..   | Informan 22 |
| 8. | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah   | Pembinaan dari PKB dan dinas kurang   | Informan 22 |

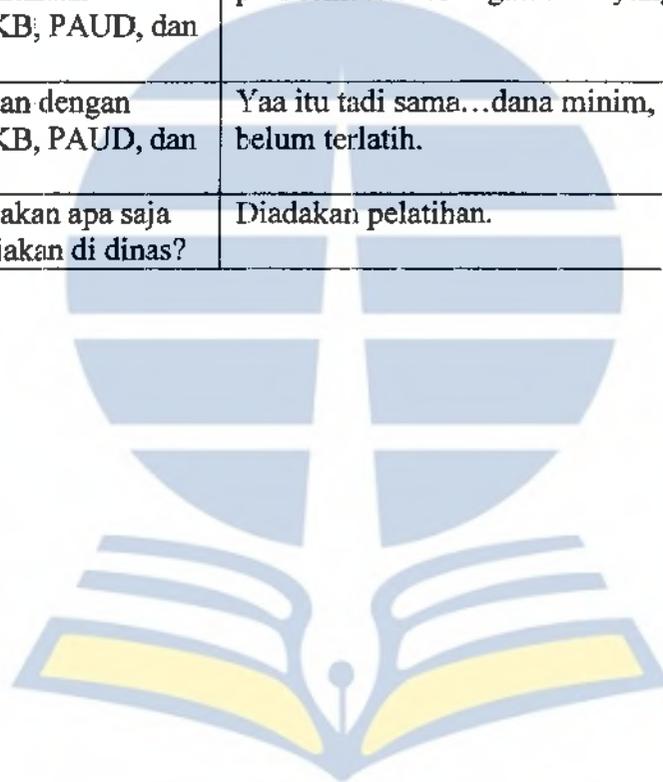
|     |  |  |             |
|-----|--|--|-------------|
|     | dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?      | banyak...dukungan dana yang minim.               |             |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih. | Informan 22 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?                    | -  | Informan 22 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 13. PAUD di gedung PAUD lalu BKB bareng SDIDTK Posyandu. Pelaksanaan di balai dusun. | Informan 23 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Tidak semua bareng...gentian.   | Informan 23 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru PAUD juga dan kader Posyandu semua ada 9.  | Informan 23 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...baru 4 yang pernah pelatihan   | Informan 23 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat diklat atau PKB   | Informan 23 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dan terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas.                    | Informan 23 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal. Susah membagi jadwal dengan kegiatan lain. Dilakukan sebatas kemampuan.  | Informan 23 |

|     |  |  |             |
|-----|--|--|-------------|
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas KB, puskesmas...dukungan dana yang minim. | Informan 23 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi sama...dana minim, kader belum terlatih.                            | Informan 23 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Diadakan pelatihan.  | Informan 23 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.                                    | Informan 24 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Tidak, yang bareng PAUD dan BKB nya...kalau SDIDTK di Posyandu  | Informan 24 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya ada 8  | Informan 24 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...   | Informan 24 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...sesuai penjelasan PKB   | Informan 24 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dana terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas. | Informan 24 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal. Sesuai yang kami bisa lakukan.   | Informan 24 |

|     |  |  |             |
|-----|--|--|-------------|
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB dan dinas kurang banyak...dukungan dana yang minim. | Informan 24 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Sarana prasarana dan dana minim, kader belum terlatih.                 | Informan 24 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Tidak paham.   | Informan 24 |



### REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN  | KETERANGAN  |
|----|--|--|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 13. Pelaksanaan di balai dusun.                                       | Informan 25 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Iya...dilaksanakan bareng...PAUD dulu terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam 11-an. | Informan 25 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru PAUD juga dan kader Posyandu semua ada 9.                                     | Informan 25 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan  | Informan 25 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat diklat atau penjelasan PKB   | Informan 25 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dan terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas.     | Informan 25 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah  | Belum optimal. Sak mampunya..kadang juga   | Informan 25 |

|     |  |   |             |
|-----|--|---|-------------|
|     | optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?  | susah membagi jadwal dengan kegiatan lain. Namanya di desa kan musti bergaul dengan masyarakat. |             |
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas KB...dukungan dana yang minim.                           | Informan 25 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih.  | Informan 25 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | Kurang paham Bu...tapi pernah diundang pelatihan.   | Informan 25 |



## DATA HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN   | JAWABAN   | KETERANGAN  |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?                         | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.                                    | Informan 26 |
| 2. | Apakah terpadu 3 jenis layanan?  | Iya...dilaksanakan bareng...  | Informan 26 |
| 3. | Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok Anda?   | Kadernya ada 5  | Informan 26 |
| 4. | Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?                       | Belum Bu...   | Informan 26 |
| 5. | Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Belum..sesuai penjelasan PKB  | Informan 26 |
| 6. | Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                   | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Dukungan dana terbatas. Kami para kader juga pemahaman dan wawasan terbatas. | Informan 26 |
| 7. | Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?      | Belum optimal. Sak mampunya..   | Informan 26 |

|     |  |  |             |
|-----|--|--|-------------|
| 8.  | Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? | Pembinaan dari PKB dan dinas kurang banyak...dukungan dana yang minim. | Informan 26 |
| 9.  | Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?                                       | Yaa itu tadi...dana minim, kader belum terlatih.                       | Informan 26 |
| 10. | Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?  | -  | Informan 26 |

